



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**KANTOR GUBERNUR DAN BUPATI DI SERANG:  
REPRESENTASI KUASA DAN IDENTITAS**

**SKRIPSI**

**NURRANGSI ADZANI ARSI**

**0806332534**

**FAKULTAS TEKNIK**

**PROGRAM STUDI ARSITEKTUR**

**DEPOK**

**JULI 2012**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**KANTOR GUBERNUR DAN BUPATI DI SERANG:  
REPRESENTASI KUASA DAN IDENTITAS**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana  
Arsitektur**

**NURRANGSI ADZANI ARSI**

**0806332534**

**FAKULTAS TEKNIK**

**PROGRAM STUDI ARSITEKTUR**

**DEPOK**

**JULI 2012**

**Universitas Indonesia**

**HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS**

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Nurrangsi Adzani Arsi**

**NPM : 0806332534**

**Tanda Tangan : **

**Tanggal : 9 Juli 2012**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi ini diajukan oleh :  
Nama : Nurrangsi Adzani Arsi  
NPM : 0806332534  
Program Studi : Arsitektur  
Judul Skripsi : Kantor Gubernur dan Bupati di Serang:  
Representasi Kuasa dan Identitas

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Arsitektur pada Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Indonesia

**DEWAN PENGUJI**

Pembimbing : Dr. Kemas Ridwan Kurniawan ST.,M.Sc

(.....)

Penguji : Mohammad Nanda Widyarta, B.Arch., M.Arch

(.....)

Penguji : Han Awal, Dipl.Ing.

(.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 9 Juli 2012

Universitas Indonesia

## KATA PENGANTAR

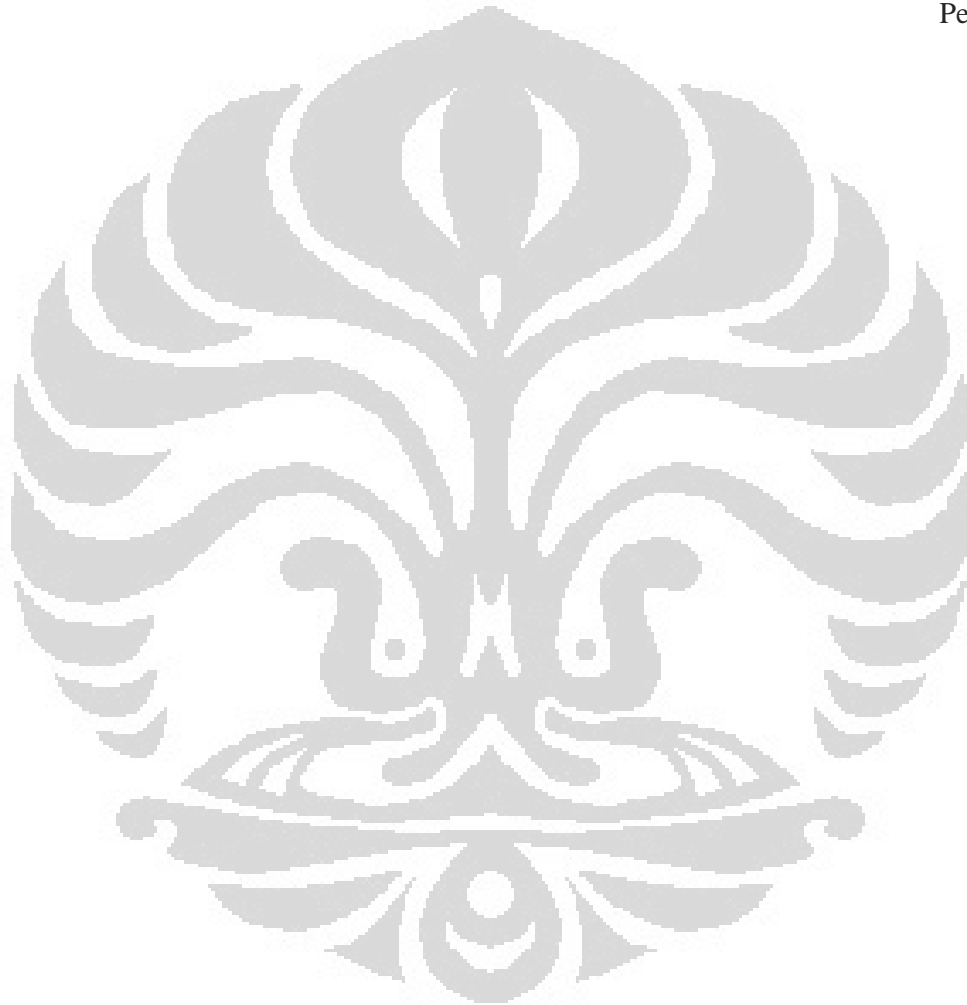
Puji Syukur dipanjatkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan sebagai bagian dari proses penyelesaian studi S1 jurusan Arsitektur dan untuk memenuhi syarat demi mencapai gelar Sarjana Arsitektur pada Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Selama masa pengerjaan skripsi ini, tentu tidak semua dapat berjalan mulus, selalu terdapat hambatan dan rintangan baik dari diri sendiri maupun dari luar. Oleh karena itu, penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari beberapa pihak, penyelesaian skripsi ini tidak akan berjalan dengan baik. Maka dari itu, pada kesempatan ini penulis menghaturkan terima kasih kepada:

- (1) Bapak Kemas Ridwan selaku pembimbing skripsi yang telah berbaik hati menyediakan waktu serta pikiran untuk membimbing dan membantu penulis selama proses penulisan skripsi ini
- (2) Mas Gamal dan Mbak Rini selaku koordinator skripsi 2012
- (3) Abah Yadi yang telah bersedia menjadi narasumber dalam sejarah kota Serang
- (4) Bapak Juliadi dan para pegawai kantor BP3S yang telah menyediakan waktunya serta memberikan kemudahan bagi penulis untuk memperoleh data penunjang
- (5) Yasinka Ainur yang bersama-sama mengerjakan skripsi di bawah bimbingan pak Kemas dan teman-teman arsitektur angkatan 2008 lainnya yang juga melewati kesenangan dan kesulitan bersama selama masa perkuliahan di arsitektur UI
- (6) Orang tua dan keluarga yang selalu memberikan dukungannya kepada penulis
- (7) Pihak-pihak lain yang telah membantu namun tak dapat penulis sebutkan satu per satu

Penulis sadar bahwa dalam proses pengerjaan skripsi ini tidak akan luput dari kekurangan. Akhir kata, semoga penulisan skripsi ini akan memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu dan memicu pada pemikiran-pemikiran selanjutnya.

Depok, 9 Juli 2012

Penulis



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurrangsi Adzani Arsi

NPM : 0806332534

Program Studi : Arsitektur

Departemen : Arsitektur

Fakultas : Teknik

Jenis karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : **Kantor Gubernur dan Bupati di Serang: Representasi Kuasa dan Identitas**. beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 9 Juli 2012

Yang menyatakan



( ..... )

**Universitas Indonesia**

## ABSTRAK

Nama : Nurrangsi Adzani Arsi

Program Studi : Arsitektur

Judul : Kantor Gubernur dan Bupati di Serang: Representasi

### Kuasa dan Identitas

Skripsi ini akan membahas keterkaitan antara aspek kuasa dan identitas dengan arsitektur. Penulisan menggunakan metode deskriptif dan analitis berdasarkan data dari hasil pengamatan, wawancara, dengan pertimbangan berdasar teori-teori atas kuasa dan identitas. Studi kasus dilakukan pada gedung kantor Gubernur dan Bupati di Serang. Serang telah mengalami beberapa periode perubahan dalam sejarah pemerintahannya. Dan perubahan-perubahan ini berpengaruh juga terhadap citra dan makna dari arsitektur. Keterkaitan antara kuasa dan identitas pada gedung kantor Gubernur dan Bupati di Serang terlihat melalui upaya-upaya pemberian ciri Banten dari segi fisik, wacana, dan penggunaan serta nilai tradisi di dalamnya.

Kata Kunci: bangunan pemerintah, kuasa, identitas, sejarah, Serang



**ABSTRACT**

*Name* : Nurrangsi Adzani Arsi

*Study Program* : *Architecture*

*Title* : *Governor and Regent's Office in Serang: Representation of Power and Identity*

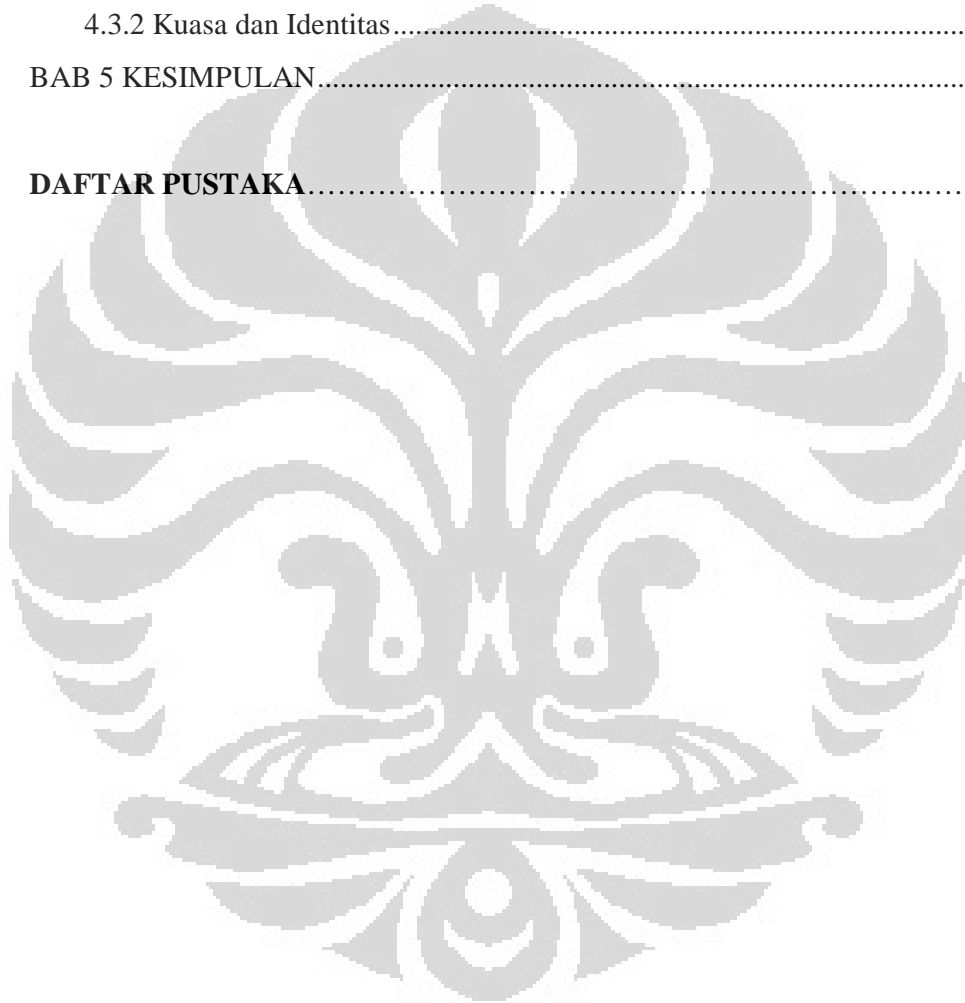
*This minithesis will explore the relationship between aspects of power and identity with architecture. The writing use descriptive and analytical methods based on data from observations, interviews, with consideration of power and identity theories. The case studies are the Governor and Regent's office building in Serang. Serang has undergone several periods in its history of reign. And these changes of reign are affecting the image and meaning of architecture. The link between power and identity in the Governor and Regent's office building in Serang are visible through the efforts of giving Banten attribute in terms of physical characteristics, discourse, the use and value of tradition in it.*

*Keyword: government building, power, identity, history, Serang*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN SAMPUL.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan Penulisan.....	2
1.4 Ruang Lingkup Pembahasan.....	2
1.5 Metode Penulisan.....	3
1.6 Sistematika.....	3
<b>BAB 2 KAJIAN TEORI</b> .....	<b>5</b>
2.1 Kuasa dan Identitas.....	5
2.1.1 Kuasa.....	5
2.1.2 Identitas.....	8
2.2 Pengertian Pemerintah.....	11
2.3 Perwujudan Kuasa dan Identitas dalam Perancangan Bangunan Pemerintahan.....	12
<b>BAB 3 PROFIL DAN SEJARAH KOTA SERANG</b> .....	<b>17</b>
3.1 Profil Kota Serang.....	17
3.2 Sejarah serta Perkembangan Pemerintahan di Serang.....	18

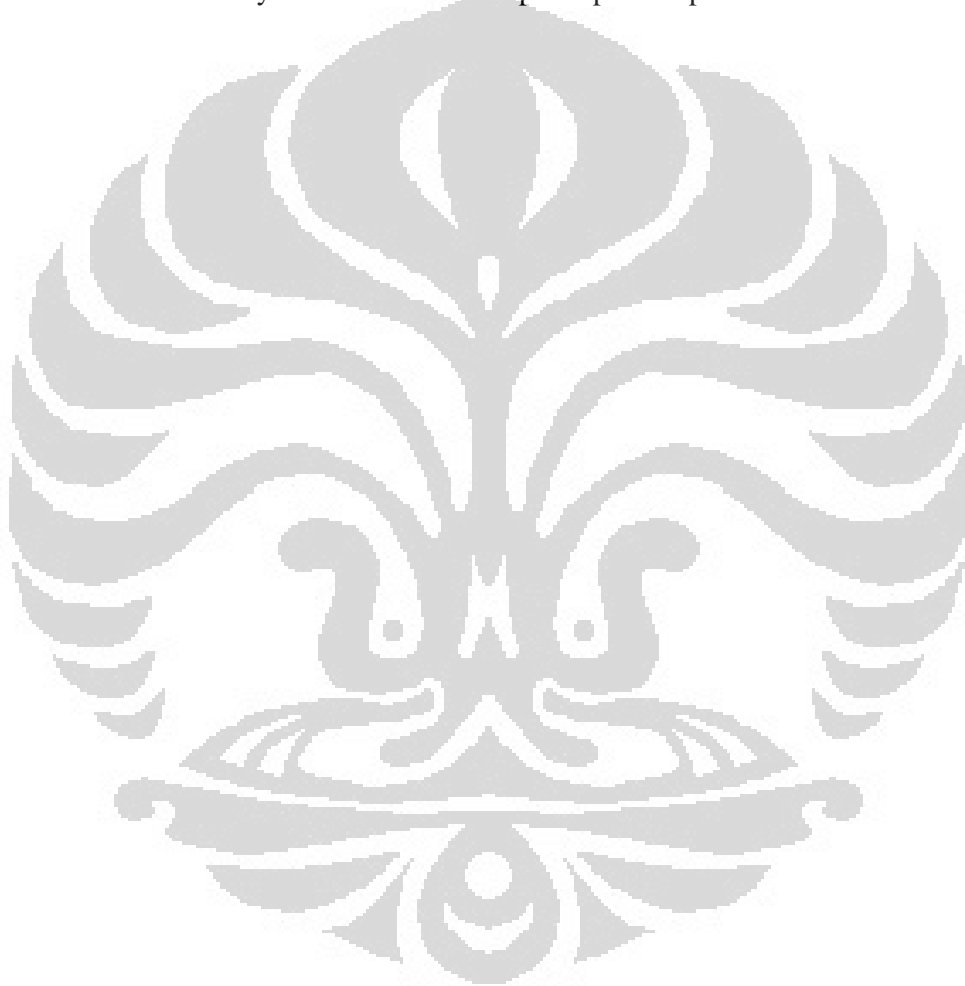
BAB 4 STUDI KASUS BANGUNAN PEMERINTAH DI SERANG.....	31
4.1 Bangunan Pemerintahan dalam Ruang Kota.....	31
4.2 Gedung Gubernur Banten .....	36
4.2.1 Sejarah .....	36
4.2.2 Kuasa dan Identitas.....	37
4.3 Gedung Bupati Serang .....	47
4.3.1 Sejarah .....	47
4.3.2 Kuasa dan Identitas.....	47
BAB 5 KESIMPULAN.....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>58</b>



## DAFTAR GAMBAR

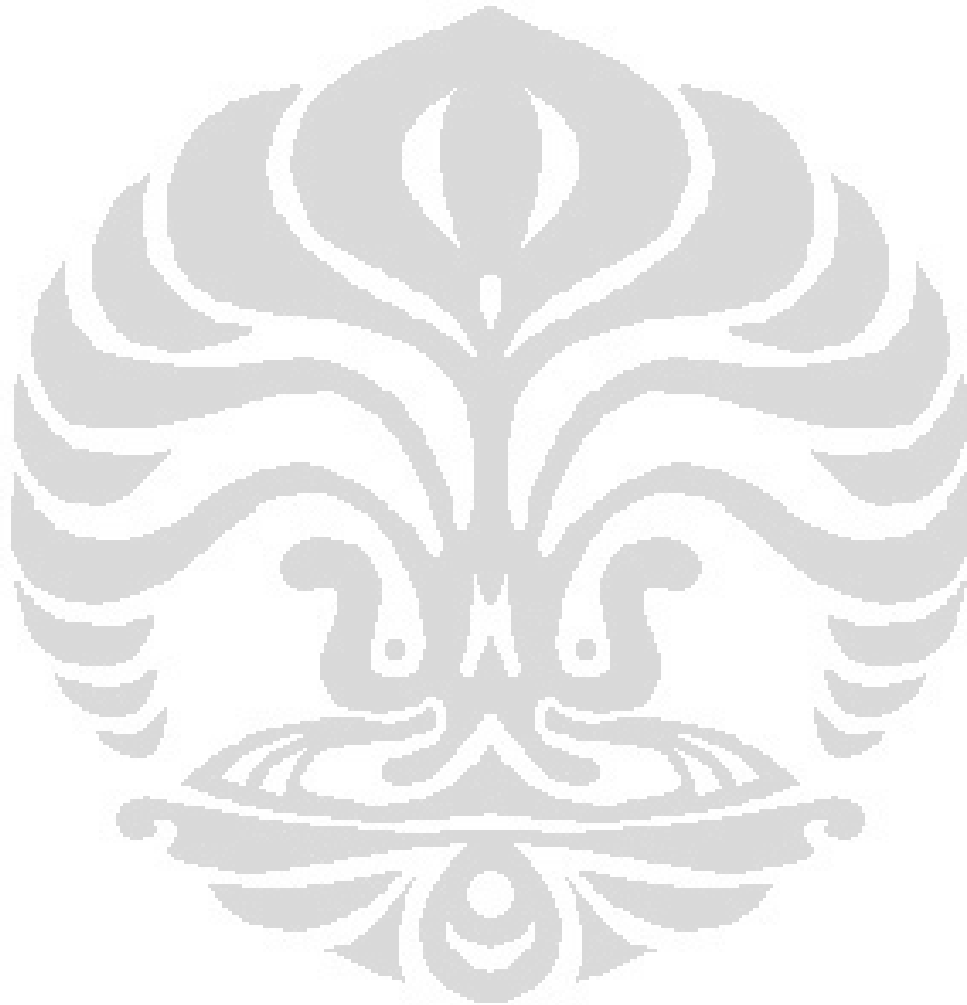
Gambar 2.1: Lincoln Memorial.....	13
Gambar 2.2: <i>royal axis</i> Paris.....	15
Gambar 2.3: Fasad gedung parlemen (kiri) dan Haus Tambaran (kanan) di Papua Nugini.....	16
Gambar 3.1: Wilayah Kota Serang .....	17
Gambar 3.2: Logo Kota Serang .....	18
Gambar 3.3: Lanskap Karesidenan Banten (1872) .....	19
Gambar 3.4: Perpindahan pusat pemerintahan ke Banten (Abad ke-15).....	19
Gambar 3.5: Kaibon Setelah Penghancuran (Gerbang Kaibon) Tahun 1846 .....	20
Gambar 3.6: Runtuhnya Kesultanan Banten dan perpindahan pusat pemerintahan ke Serang.....	21
Gambar 3.7: Runtuhnya Kota dan Kesultanan (Abad ke-19) .....	22
Gambar 3.8: Struktur Birokrasi Pemerintahan Hindia Belanda.....	23
Gambar 3.9: Peta Kota Serang Tahun 1945.....	24
Gambar 3.10: Kampung di karesidenan Banten tahun 1900.....	25
Gambar 3.11: Peta Banten Tahun 1900 (pusat kota) .....	26
Gambar 3.12: Jalan raya sebagai jalur transportasi utama.....	27
Gambar 3.13: Jalur Kereta api (Awal Abad ke-20) .....	28
Gambar 3.13: Struktur Pemerintahan Daerah .....	30
Gambar 4.1: Peta Serang tahun 1945.....	32
Gambar 4.2: Bangunan pemerintahan dan jaringan kota.....	33
Gambar 4.3: Jaringan dan peruntukkan bangunan.....	34
Gambar 4.5: Demo pekerja di depan kantor gubernur (kiri) dan demo warga Pulau Panjang kepada Bupati Serang (kanan) 2012 .....	36
Gambar 4.6: Gedung Gubernur Banten/Residen Banten ( <i>Residentie van Bantam</i> abad ke -19).....	37
Gambar 4.7: Tampak Depan Gedung Gubernur Banten tahun 1990.....	38
Gambar 4.8: Gerbang masuk kantor Gubernur .....	39
Gambar 4.9: Gerbang masuk masjid Agung Banten.....	39
Gambar 4.10: Bangunan samping kantor Gubernur .....	40
Gambar 4.11: Ruang dalam Masjid Agung Banten .....	41
Gambar 4.12: Halaman kantor Gubernur (2012) .....	41
Gambar 4.13: meriam Ki Amuk di Banten Lama .....	42
Gambar 4.15: Denah Kantor Gubernur (1991) .....	43

Gambar 4.16: Ruang tamu kantor Gubernur (2012) .....	43
Gambar 4.17: Ruang tamu kantor Gubernur (2012) .....	44
Gambar 4.18: Ruang sidang kantor Gubernur (2012).....	44
Gambar 4.19: Seba Baduy 2012 di kantor Gubernur .....	46
Gambar 4.20: Gedung kantor Bupati Serang (2012) .....	48
Gambar 4.21: Gerbang kaibon di kabupaten(kiri), gerbang keraton kaibon.....	48
Gambar 4.22: Hiasan pot di pendopo kabupaten .....	49
Gambar 4.26: Perayaan Maulud Nabi di pendopo kabupaten tahun 1920.....	54



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Data Bangunan.....	60
Lampiran 2: Profil Narasumber Wawancara.....	62



# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Arsitektur hadir dan memiliki wujud yang nyata. Pada hakikatnya arsitektur tercipta akibat proses manusia mengolah alam dan menjadikannya sebagai ruang-ruang untuk hidup dan berkegiatan. Arsitektur juga tak dapat berdiri sendiri tanpa menyerap faktor sosial budaya yang melingkupinya. Terutama karena manusia menghadirkan arsitektur sebagai ruang bagi kesehariannya, baik itu yang bersifat personal maupun publik. Berbagai aspek yang mampu mempengaruhi citra arsitektur salah satunya adalah aspek kuasa dan identitas. Dalam hal ini, arsitektur dapat menjadi simbol bagi identitas dan pengaruh kuasa dari manusia yang hidup di dalamnya.

Kuasa mempengaruhi terhadap apa yang ditunjukkan atau direpresentasikan dalam arsitektur. Sedangkan identitas dibutuhkan untuk membedakan diri dengan yang lainnya yang mencerminkan kehidupan dari komunitas dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, serta dapat menjadi wujud dari kebanggaan atas diri dan bangsanya. Namun, bagaimana bangunan dapat menunjukkan identitas dan kuasa yang terkandung di dalamnya? Pada penulisan skripsi ini, studi kasus dilakukan pada bangunan pemerintahan yang berlokasi di kota Serang, khususnya bangunan kantor Gubernur dan Bupati Serang yang telah dibangun sejak masa kolonial.

Kota Serang dipilih sebagai studi kasus karena memiliki sejarah yang cukup panjang dan telah mengalami beberapa periode perubahan dalam sejarah pemerintahannya. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan beberapa pihak, di kota ini telah terdapat kerajaan Hindu-Sunda yang terletak di kawasan Banten Girang. Kemudian pada abad ke-16 kesultanan Banten berdiri dengan pusatnya di daerah pesisir yang saat ini dikenal sebagai kawasan Banten Lama. Ketika kesultanan runtuh, pusat pemerintahan dipindahkan ke Serang, dan bekas wilayah kesultanan Banten dibagi menjadi 4 wilayah. Serang menjadi tempat kantor

*Residencie van Bantam* selama era kolonial Hindia Belanda. Setelah tercapainya kemerdekaan Indonesia, wilayah Serang menjadi kabupaten dan kota Serang sekaligus menjadi ibukota dari provinsi Banten. Apakah pergantian kekuasaan ini akan mempengaruhi citra arsitektur berikut dengan makna yang terkandung di dalamnya?

Studi yang dilakukan tidak hanya melalui pengamatan langsung terhadap bangunan pemerintahan di Serang, namun juga melalui kajian sejarah, dan melihat berbagai gambar, foto, maupun tulisan yang menceritakan bangunan tersebut. Selain itu, akan dilakukan juga pembahasan tentang salah satu penggunaan bangunan yang kaitannya erat dengan tradisi masyarakat. Hal ini dilakukan agar dapat melihat keterkaitan antara identitas dan kuasa terhadap arsitektur dari sumber yang lebih luas dan tidak sebatas dari wujud bangunan tersebut saja.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini adalah tentang bagaimana keterkaitan antara kuasa, identitas terhadap arsitektur. Bagaimanakah bangunan pemerintahan dapat terkait oleh kuasa dan identitas? Lalu berdasarkan sejarah tentang perubahan dalam kuasa pemerintahan di Serang, bagaimanakah keterkaitannya dengan kuasa dan identitas yang diwujudkan dalam arsitektur?

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui keterkaitan antara kuasa dan identitas yang diwujudkan di dalam arsitektur, khususnya pada bangunan pemerintahan di Serang, yaitu gedung kantor Gubernur Banten dan Bupati Serang. Dari penjabaran dan analisis yang dilakukan diharapkan dapat membangkitkan pemikiran ulang atas penggunaan elemen arsitektur sebagai simbol identitas dan kuasa.

## **1.4 Ruang Lingkup Pembahasan**

Pembahasan difokuskan pada bangunan pusat pemerintahan yang berlokasi di kota Serang, yaitu gedung kantor Gubernur dan Bupati yang telah didirikan sejak jaman kolonial Belanda serta kaitannya dengan elemen kota



lainnya. Dalam penulisan skripsi ini lebih dititikberatkan pada keadaan dan kondisi bangunan di masa sekarang, meski data berupa sejarah masa lalu juga dijadikan bahan pertimbangan analisis. Hal yang dikaji adalah keterkaitan antara aspek kuasa dan identitas dalam arsitektur, dan dalam kasus ini telah terjadi pergantian kekuasaan, dari kesultanan Banten menjadi pemerintahan kolonial lalu sekarang kuasa kembali lagi berada dalam tangan pribumi Banten. Dalam kajian ini tidak akan dibahas keterkaitan arsitektur dengan kuasa informal yang berada dibalik kuasa formal. Hal yang diperhatikan adalah percampuran antara identitas dan kuasa yang lama terhadap keadaan serta kondisi saat ini. Dalam memaparkan keterkaitan antara identitas dan kuasa dalam pusat pemerintahan ini, dibutuhkan teori-teori tentang pengertian kuasa dan identitas. Kemudian dapat dilihat pula contoh-contoh arsitektur pusat pemerintahan lainnya di dunia dalam kaitannya dengan kuasa dan identitas sebagai tambahan bahan pertimbangan analisis.

### **1.5 Metode Penulisan**

Metode yang digunakan dalam penulisan adalah deskriptif dan analitis melalui data dan teori. Pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan langsung, pencarian gambar, foto, dan tulisan yang terkait dengan studi kasus serta wawancara terhadap tokoh terkait. Penulisan juga dibantu oleh teori-teori tentang kuasa dan identitas dari berbagai sumber literatur sebagai dasar bagi analisis terhadap data yang ada.

### **1.6 Sistematika**

Untuk mempermudah dan memperjelas tulisan, maka dalam penulisan skripsi ini terbagi menjadi beberapa bab:

#### Bab 1 Pendahuluan

Di dalam bab ini dipaparkan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan ruang lingkup penulisan serta metode penulisan dan sistematika yang digunakan.

#### Bab 2 Kajian Teori

Di dalam bab ini akan dijelaskan mengenai teori kuasa dan identitas, pengertian pemerintah, dan contoh-contoh perwujudan arsitektur dalam kaitannya dengan identitas dan kuasa.

### Bab 3 Profil dan Sejarah Kota Serang

Bab ini akan menerangkan profil kota Serang beserta perjalanan sejarahnya. Dalam perkembangannya, telah terjadi beberapa kali pergantian pemerintahan hingga pemindahan pusat pemerintahan ke wilayah Serang dan akhirnya membentuk kota Serang sekarang ini.

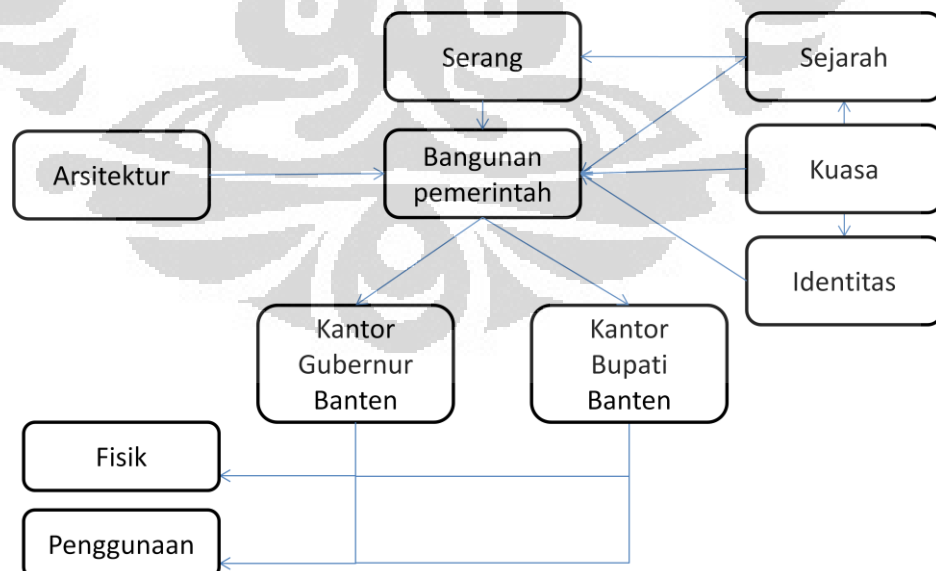
### Bab 4 Studi Kasus Bangunan Pemerintah di Serang

Dalam bab ini akan dilakukan analisis terhadap keadaan bangunan pemerintahan di Serang, khususnya gedung kantor Bupati Serang dan Gubernur Banten, dan kaitannya terhadap aspek kuasa dan identitas.

### Bab 5 Penutup

Dalam bab ini akan diberikan kesimpulan dan saran

#### Kerangka Pemikiran



## BAB 2

### KAJIAN TEORI

#### 2.1 Kuasa dan Identitas

Arsitektur diciptakan tidak semata demi fungsinya untuk memwadhahi kegiatan-kegiatan manusia dan juga tidak dapat berdiri sendiri tanpa menyerap faktor sosial budaya yang melingkupinya. Dalam perancangannya, arsitektur juga dapat dipengaruhi oleh kuasa serta identitas yang menjadi wujud bagi citra manusia yang hidup di dalamnya.

##### 2.1.1 Kuasa

Kuasa dapat diartikan sebagai kemampuan atau kesanggupan untuk melakukan dan berbuat suatu hal, serta dapat berarti kekuatan. Kuasa berkaitan juga dengan wewenang dan pengaruh. Oleh karena itu, dalam konsep kuasa terdapat suatu pihak yang mendominasi (berwenang dan berpengaruh) terhadap suatu pihak lainnya. Pengaruh dan wewenang ini dapat juga bersifat memaksa.

Kuasa adalah kemampuan mengontrol dan mengendalikan berbagai aspek dalam kehidupan sosial. Suatu kelompok dikatakan memiliki kuasa jika mereka dapat mengontrol/mengendalikan tindakan dan pikiran dari kelompok lain (Teun A Van.Dijk). Kemampuan ini dapat diperoleh karena kelompok tersebut memiliki hak terhadap akses sumber-sumber kuasa, seperti uang, status dan kedudukan, popularitas, pengetahuan, informasi, dan lain sebagainya. Kuasa dapat dibedakan sesuai dengan beragam sumber yang dipergunakannya, seperti orang kaya yang memiliki kuasa karena harta yang dimilikinya, kuasa yang memaksa dan mengandung kekerasan oleh pihak militer, dan kuasa yang bersifat persuasif/mendorong oleh orang tua, guru, jurnalis yang berbasis pengetahuan, informasi, dan wewenang yang mereka miliki. Suatu kelompok/golongan mungkin memiliki kontrol yang lebih tinggi atau justru kurang terhadap golongan lainnya, atau hanya dapat mengontrol orang lain dalam wilayah dan situasi tertentu, oleh karena itu kuasa dirasa jarang bersifat absolut. Kuasa dari golongan yang mendominasi juga

dapat terintegrasi dengan peraturan, norma, dan kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat sehingga mereka memiliki legitimasi atas kuasa tersebut.

Kuasa dapat muncul karena terdapat perbedaan bagi pihak yang berkuasa dengan yang dikuasai. Dalam hal ini, yang berkuasa memiliki akses lebih untuk mempengaruhi dan mengendalikan yang lainnya. Sedangkan yang dikuasai lebih cenderung menerima dengan damai ataupun melawan. Menurut Foucault kuasa tak hanya menghasilkan penekanan untuk apa yang dikendalikannya, namun juga produktif (Hall, 1997). Namun menurutnya kuasa tersebut lebih dilaksanakan daripada dimiliki, dan bukan menjadi hak istimewa yang hanya dimiliki oleh kelas yang mendominasi. Kuasa menjadi akibat yang terwujud dan terkadang diperluas oleh posisi orang yang didominasi (Foucault, 1977). Hal ini karena kuasa tak hanya berwujud dalam peraturan dan larangan, namun juga terlihat dari akibatnya yang menyebabkan orang melakukan perlawanan, menolak untuk berada dalam cengkeramannya, dan melalui orang yang didominasi inilah kuasa juga tersebar. Kuasa digunakan dan dilaksanakan dalam pengaturan seperti jaringan dan hubungan kuasa meresap ke semua tingkatan dalam kehidupan sosial.

Jika kuasa berarti dapat mengontrol dan mengendalikan orang lain, maka untuk mendapatkan kuasa tersebut seseorang terlebih dahulu harus dapat mempengaruhi pikiran orang lainnya. Hal ini karena perilaku manusia dikendalikan oleh pikirannya. Apabila seseorang dapat mempengaruhi pikiran orang-orang lainnya, termasuk pengetahuan dan pendapat mereka, maka orang tersebut secara tidak langsung dapat mengendalikan tindakan mereka melalui jalan manipulasi ataupun persuasi. Kuasa menghasilkan pengetahuan tentang apa yang baik, apa yang buruk, apa yang salah dan benar.

Menurut Foucault pengetahuan diproduksi dari wacana dan mengandung hubungan atas kuasa. Ia memandang kebenaran dari pengetahuan sebagai sesuatu yang relatif karena sesuatu dapat berarti dan 'benar' hanya dalam konteks sejarah tertentu. Pengetahuan selalu terikat dan terhubung dengan kuasa karena selalu digunakan pada praktik pengaturan perilaku sosial (Hall, 1997). Kuasa bukan hanya memproduksi pengetahuan, justru kuasa dan pengetahuan dapat saling mempengaruhi satu dengan lainnya. Hal ini karena tidak terdapat hubungan kuasa

tanpa korelasi dengan konstitusi di dalam pengetahuan maupun pengetahuan yang tidak mengandaikan dan merupakan relasi kekuasaan di waktu yang sama (Foucault, 1997). Kuasa menurutnya juga beroperasi dalam lembaga aparatur dan teknologi yang digunakan.

*“Foucault’s conception of apparatus of punishment, for example, included a variety of diverse elements, linguistic and non-linguistic-discourses, institutions, architectural arrangements, regulations, laws, etc.. The apparatus is thus always inscribed in a play of power but it is also always linked to certain co-ordinate of knowledge.”* (Hall, 1997)

Menurutnya pula, pengetahuan yang selalu terkait dengan kuasa, tak hanya dapat mempengaruhi kebenaran, namun memiliki daya untuk menjadikan itu ‘benar’. Pengetahuan ketika diterapkan pada dunia nyata, dan memberikan efek yang nyata, akan dapat dirasakan sebagai sebuah ‘kebenaran’. Kuasa juga terlibat dalam pertimbangan tentang apa dan di dalam keadaan yang bagaimana pengetahuan dapat atau tidak diterapkan.

Dalam teori kuasa yang dipaparkan oleh Anderson, terdapat perbedaan antara konsep kuasa Barat (Eropa) dengan yang ada di Indonesia. Hal ini karena masyarakat telah memiliki budaya sendiri, termasuk dalam perilaku politiknya. Sepertinya cara pandang masyarakat lokal terhadap kuasa berkaitan dengan apa yang disebut ‘kesaktian’ (Anderson, 1990).

Upaya yang dilakukan untuk mendapat kuasa dalam tradisi Jawa adalah dengan praktek dan tingkah laku tapa. Nilai penting yang dikandung dalam kegiatan tapa ini adalah untuk meraih kuasa/kesaktian dan bukan semata untuk melawan hawa nafsu. Upacara-upacara yang dilakukan oleh kaum penguasa Indonesia menurut Anderson adalah upaya untuk mengkonsentrasikan dan memamerkan kuasa. Dalam tradisi kuno juga, seorang penguasa harus mengumpulkan disekitarnya benda atau orang yang dipercayai memiliki kesaktian. Dalam hal ini, pengumpulan benda/orang tersebut adalah agar kuasa/kesaktian yang berasal dari benda/orang tersebut dapat diserap oleh penguasa dan meningkatkan kuasa/kesaktiannya sendiri. Dalam pemahaman Jawa atas kuasa juga disebutkan bahwa tanda nyata dari pemilik kuasa adalah kemampuannya untuk mengumpulkan (mengkonsentrasikan) kuasa ke dalam

dirinya, bahkan menyerap aspek-aspek yang berlawanan. Dalam cerita-cerita kuno disebutkan bahwa ketika seorang ksatria memenangkan pertempuran, maka kesaktian lawannya diserap dan dapat menambah kesaktiannya sendiri.

Pemerintahan di Jawa digambarkan Anderson sebagai cahaya yang mengerucut, yaitu dengan semakin jauhnya jarak penguasa maka kuasanya akan semakin redup. Kekacauan yang terjadi di suatu negeri dianggap terjadi karena tercerai-berainya kuasa. Namun, terdapat pemahaman bahwa setelah kekacauan yang terjadi periode damai akan datang kembali karena dipercaya bahwa sejarah seperti roda yang berputar dan rangkaian daur yang berulang.

Baik kuasa dalam teori barat yang terhubung dengan pengetahuan, serta konsep kuasa di tanah air yang mengandung arti sebagai kesaktian ragawi, keduanya dapat menjadi sarana manipulasi ataupun persuasi yang dapat mengendalikan perilaku orang lainnya. Hal yang perlu diperhatikan kemudian adalah di saat dan kondisi bagaimanakah pengetahuan ataupun kesaktian ini dipertunjukkan sehingga dapat mempengaruhi orang-orang lainnya.

### **2.1.2 Identitas**

Identitas adalah pernyataan diri, dan jawaban atas pertanyaan ‘siapa?’. Identitas secara mudah dapat dianggap sebagai sesuatu yang menjelaskan siapa saya. Kata identitas dapat mengacu pada identitas pribadi (*personal identity*) ataupun sosial. Apabila ditelusuri, kata identitas sendiri merupakan kata serapan dari bahasa asing yaitu *identity*. Dalam kamus Inggris Oxford kata ini diartikan sebagai fakta, karakteristik yang menjadikan siapa atau benda apa. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, identitas diartikan sebagai ciri-ciri atau keadaan yang khusus. Hal ini menunjukkan bahwa identitas dapat diketahui melalui ciri khusus suatu objek yang merupakan gabungan dari karakteristik sehingga membuatnya dapat dikenali atau diketahui.

Kata identitas yang dalam bahasa Inggris disebut *Identity* ternyata berasal dari bahasa Latin ‘identitas’ dan ‘idem’ yang dapat diartikan ‘sama’. Mungkin hal ini mengacu pada teori identitas sosial dimana pengertian kelompok sosial adalah kumpulan dari orang-orang yang memiliki kesamaan dalam identifikasi sosial atau

memandang dirinya sebagai anggota dari kategori(golongan) sosial yang sama. Melalui perbandingan sosial, orang yang memiliki kesamaan masuk ke dalam kelompok, sedangkan orang-orang yang berbeda berada di luar kelompok.

Identitas dapat terbentuk melalui proses kategorisasi diri/ identifikasi. Identitas sosial adalah kesadaran seseorang bahwa dirinya menjadi bagian dari kelompok atau kategori(golongan) sosial tertentu. (Stets dan Burke, 2000). Dua proses penting dalam pembentukan identitas sosial adalah kategorisasi diri dan perbandingan sosial. Dalam kategorisasi diri dititikberatkan pada persamaan yang dirasakan antara satu dengan lainnya di dalam kelompok, dan perbedaan yang dirasakan dengan orang di luar kelompok. Penekanan ini berlaku pada segala tingkah laku, nilai dan kepercayaan, norma, cara bicara, dan lainnya. Sedangkan dalam perbandingan sosial, terdapat peningkatan diri, misalnya seseorang merasa harga dirinya meningkat ketika ia merasa menjadi bagian dari kelompok.

Ketika berada dalam masyarakat, orang memperoleh identitasnya atau rasa diri secara luas dari golongan sosial dimana mereka termasuk di dalamnya. Oleh karena itu setiap orang memiliki keunikan masing-masing karena pengalaman dan sejarah hidupnya yang menghasilkan kombinasi golongan sosial yang unik (Stets dan Burke, 2000). Memiliki identitas sosial tertentu berarti menjadi kesatuan dengan kelompok/ golongannya, menjadi seperti yang lainnya, dan memandang sesuatu dengan cara pandang kelompoknya. Hal ini mungkin juga terkait dengan budaya dimana terdapat makna yang dimiliki dan dibagikan bersama anggota kelompok. Menurut Hall, makna memberikan kita rasa akan identitas tentang siapa mereka dan dengan siapa orang-orang tergabung (Hall, 1997)

Teori identitas sosial berurusan dengan hubungan di dalam kelompok, yaitu tentang bagaimana orang melihat dirinya sebagai bagian dari kelompok/golongan dibandingkan dengan orang lainnya yang berada di luar kelompok. Menurut Anderson, kelompok atau komunitas dibedakan bukan dari keaslian atau kepalsuannya, namun dengan gaya tentang bagaimana mereka dibayangkan (*imagined*). Disebut 'dibayangkan' karena anggota-anggotanya bahkan dari bagian yang terkecil sekalipun tidak akan tahu sebagian besar kawannya, bertemu dan mendengar tentang mereka, namun di dalam pikiran mereka masing-masing

telah terdapat gambaran mengenai komuni mereka (Anderson, 1983). Tentu saja kelompok yang disebut dalam paparan yang disebutkan oleh Anderson ini adalah kelompok dalam tingkatan yang luas. Di dalam teori identitas sosial, identitas memang dianggap sebagai hal yang relatif karena identitas memiliki tingkatan dan hirarki yang berbeda. Misalnya, tingkatan sebagai ‘manusia’, ‘orang Indonesia’, atau ‘bangsa timur’.

Perbedaan lain antara pandangan teori identitas sosial dengan teori identitas adalah, teori identitas sosial memandang kelompok adalah sekumpulan orang-orang yang mengenali satu dengan lainnya dengan persamaan, melihat dirinya dan yang lainnya dengan sama, dan memiliki pandangan yang juga sama, sebagai kontras dari orang di luar kelompoknya. Sedangkan teori identitas melihat kelompok sebagai kumpulan individu yang saling berhubungan, setiap dari mereka menunjukkan aktivitas yang unik namun saling terkait, melihat sesuatu dari cara pandangnya sendiri namun tetap melakukan negosiasi terhadap hubungan interaksi dalam kelompoknya.

Terdapat kesulitan untuk menguraikan identitas kelompok dengan identitas peran dan juga dengan identitas diri (Stets dan Burke, 2000). Dalam teori identitas sosial, identitas orang/ pribadi berada pada level terendah dalam kategorisasi diri, yaitu melihat diri sebagai wujud yang unik, berbeda dengan individu lainnya. Setiap individu berlaku sesuai tujuan dan keinginannya sendiri dibanding sebagai anggota kelompok/golongan. Beberapa hal dalam identitas sosial mungkin saja dapat berasal dari nilai atau rasa pribadi. Dan sebaliknya pula, identitas pribadi mungkin terhubung dengan identitas sosial tertentu.

Identitas juga terkait dengan representasi dalam lingkaran budaya (Hall, 1997). Hal ini menunjukkan bahwa identitas dapat diwakilkan ataupun disimbolkan, karena representasi adalah simbolisasi, pemberian contoh, model, atau pengganti. Dan karena identitas masuk dalam lingkaran budaya, maka produk-produk budaya juga dipengaruhi olehnya. Hasil budaya ini bisa mencakup artian luas mulai dari gaya hidup, mata pencaharian, ataupun sesuatu yang berwujud seperti karya-karya seni dan arsitektur.



Hall menyatakan bahwa identifikasi sebagai proses yang tak pernah selesai, selalu dalam tahap proses. Sedangkan identitas dibangun melalui perbedaan dan berada dalam konsekuensi yang tidak tetap (Hall, 1997). Identitas secara langsung memang dapat dikenali melalui perbedaan yang ada, dan hal ini merupakan kontras dari identitas sosial yang menyatakan kesamaan dalam anggota kelompoknya. Penyatuan serta persamaan yang disebutkan dalam identitas sosial mungkin memang bukan berupa totalitas, namun tetap saja terdapat ‘pengakuan’ atas identitas bersama tersebut. Pengakuan ini dilakukan orang-orang agar mereka dapat merasa menjadi bagian dari kelompok/golongannya.

## 2.2 Pengertian Pemerintah

Kata pemerintah berasal dari kata perintah yang dapat diartikan sebagai suatu hal yang harus dijalankan, aturan, suruhan. Pemerintah diartikan sebagai sistem yang menjalankan wewenang kekuasaan mengatur segala aspek kehidupan, misalnya sosial, ekonomi, dan politik. Pemerintah juga dapat diartikan sebagai sekelompok orang yang secara bersama memikul tanggung jawab untuk menggunakan kekuasaan. Sedangkan arti pemerintahan adalah proses, cara, dan perbuatan memerintah, dapat juga berarti segala urusan yang dilakukan untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara. Pemerintah memiliki kewenangan membuat perundangan dan hukum di wilayah yang dikuasainya, dan juga memiliki kewajiban untuk menentukan kebijakan publik demi kesejahteraan rakyatnya.

Berdasarkan pengertian kamus, kata pemerintah dalam bahasa Inggris disebut *government* yang berasal dari kata Latin *gubernare* yang artinya memerintah atau mengatur. Kata ini berasal dari kata *govern* yang memiliki arti mengontrol dan mengendalikan tindakan, sedangkan *governance* adalah tindakan dan sistem dalam mengendalikan dan mengontrol, sedangkan *governed* mengacu pada apa yang dikendalikan dan dikontrol. Dalam pengertian ini pemerintah adalah pihak yang mengontrol dan mengatur perilaku, memiliki pengaruh dan hak untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan kelangsungan wilayahnya.

### **2.3 Perwujudan Kuasa dan Identitas dalam Perancangan Bangunan Pemerintahan**

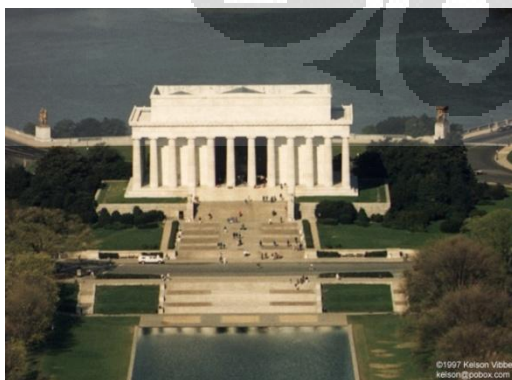
Perkembangan kota dan arsitektur tidak pernah lepas dari pengaruh politik. Rezim yang berkuasa dapat menggunakan dan memanfaatkan simbol yang dituangkan ke dalam perancangan kota dan arsitektur. Hal ini dapat terlihat dari perancangan pusat pemerintahan yang di dalamnya terdapat sarana-sarana untuk mengatur dan menjaga kesinambungan daerah yang dinaunginya. Bangunan pemerintahan dapat dibuat dengan simbol-simbol tertentu yang maknanya terkait dengan maksud penguasa ataupun si perancang baik untuk tujuan persuasif, mengancam, atau memberikan teritori atau batas, dsb.

Simbol merupakan tanda dalam bentuk visual bagi makna tertentu yang bersifat komunikatif terhadap komunitas tertentu pula. Disebut tertentu karena tak semua orang dapat mengartikannya, hanya kelompok yang memiliki pandangan sama atas dunia, dan berbagi makna yang sama-lah yang dapat memahami mengapa simbol tersebut digunakan. Ia juga tak dapat diciptakan begitu saja tanpa adanya kesepakatan dalam kelompok. Simbol merupakan representasi dari pola kehidupan dan kepercayaan yang dianut masyarakat. Sedangkan merepresentasikan sesuatu berarti menjelaskan atau menggambarkan sesuatu itu, memunculkannya dalam pikiran dengan gambaran atau lukisan atau imajinasi. Merepresentasikan sesuatu juga berarti melakukan simbolisasi (melambangkan), menjadikannya sebagai contoh, model, atau sebagai pengganti. (Hall, 1997)

Pengaruh kuasa dalam lingkungan bangun dapat terlihat melalui manipulasi ruang publik yang dilakukan untuk dapat mendominasi pihak lainnya dan menjadikan mereka tak memiliki kuasa dan kemampuan untuk menolak atau merubah. Sedangkan identitas dibutuhkan untuk membedakan diri dengan yang lainnya. Di dalam arsitektur identitas ditunjukkan melalui wujud dan ruang yang nyata. Identitas ini mencerminkan kehidupan dari komunitas dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, dan dapat menjadi wujud dari kebanggaan atas diri dan bangsanya.

Disebutkan dalam buku “*Architecture, Power, and National Identity*” bahwa desain dari ibukota dan pusat pemerintahan selalu mengandung pertanyaan tentang kuasa dan identitas yang melekat di dalamnya. Sebelum membicarakan bagaimana wujud identitas dan kuasa tersebut, terdapat pula pertanyaan tentang bagaimana sebuah arsitektur menyampaikan makna. Dalam buku ini Goodman menyatakan bahwa bangunan mungkin dapat memiliki makna yang tidak berhubungan dengan wujudnya sebagai produk arsitektur, namun dengan simbol-simbol lain. Makna bangunan juga sangat dipengaruhi oleh pilihan sang perancang. Ia mengatakan bahwa terdapat empat hal yang dapat digunakan untuk menginterpretasi bangunan pemerintahan, yaitu denotasi, pencontohan (*exemplification*), ekspresi metafora (*metaphorical expression*), dan acuan yang dimediasikan (*mediated reference*) (Vale, 1992).

Contoh kasus yang diberikan adalah gedung Lincoln Memorial di Washington D.C. Beberapa bagian dari bangunan dapat diartikan dan ‘dibaca’ secara langsung (denotasi). Contohnya pada Lincoln Memorial makna secara langsung dapat diketahui melalui pidato yang dipahat di dindingnya dan dengan sebuah patung besar yang menggambarkan sosok Lincoln. Kemudian cara kedua untuk menyampaikan makna adalah dengan mencontohkan atau menonjolkan beberapa elemen arsitektural, menggiring perhatian terhadap salah satu bagian yang dianggap penting. Dalam Lincoln Memorial, terdapat ritme solid-void yang menggiring perhatian terhadap satu titik tengah dimana patung Lincoln berada, dan ini dapat dilihat meskipun dari jarak yang cukup jauh.



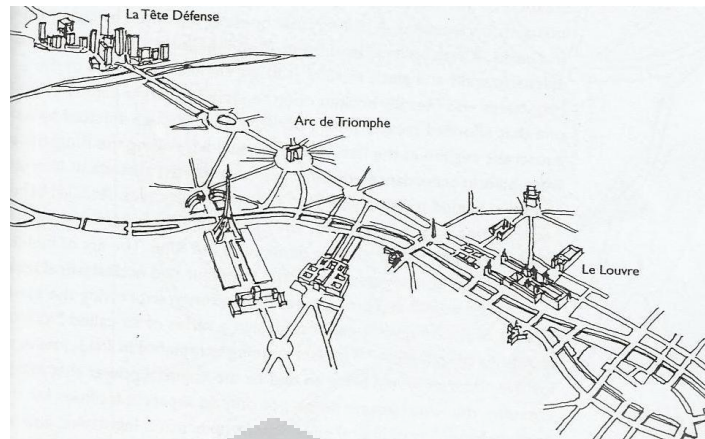
Gambar 2.1: Lincoln Memorial

Sumber: tomchappel.com



Cara yang ketiga adalah melalui ekspresi metafora. Lincoln Memorial mengambil bentuk arsitektur seperti kuil-kuil klasik dan diri Lincoln seolah menjelma seperti seorang dewa. Meski metafora ini mungkin tidak dapat diterima atau gagal dalam penyampaiannya, tapi di gedung ini telah terdapat ‘pesan’ yang jelas yang tertera di bagian atas patung: “*in this temple as in the hearts of people for whom he saved the union the memory of Abraham Lincoln is enshrined forever*”. Kemudian yang keempat adalah acuan yang dimediasikan. Terdapat alasan mengapa Lincoln diagungkan sebagai penyelamat bangsa, khususnya karena ia mengusung nilai persatuan nasional dan kesetaraan ras. Oleh karena itu, bangunan Memorial ini menjadi terkait dengan proses pembentukan peraturan tentang hak-hak sipil dan akhirnya setiap kegiatan demonstrasi yang mengusung hak sipil banyak digelar di depan Lincoln Memorial ini. Acuan yang dimediasikan inilah yang menyebabkan pembentukan makna menjadi lebih melebar dan tak mesti bersumber dari hal-hal fisik dan wujud arsitekturalnya sendiri.

Goodman menyebutkan pula bahwa meskipun bangunan memiliki arti, mungkin tak semuanya berkaitan dengan wujud arsitekturnya (Vale, 1992). Bangunan atau rancangan apapun mungkin berdiri untuk mewakili penyebab atau akibat, atau peristiwa sejarah yang berlangsung. Dalam memahami pertimbangan perancangan bangunan pemerintahan penting juga untuk meneliti hubungan keruangan antara bangunan pemerintahan tersebut dengan stuktur penting lainnya. Contohnya adalah pola kota Paris dengan *royal axis*-nya. Terdapat banyak ikon arsitektur dalam pola ruang polisentris di Paris, serta pengaturan jaringan yang bersumbu pada kerajaan. *Royal axis* yang memanjang dari Louvre awalnya melambungkan pembangunan kota berdasarkan kuasa raja, dan meski kini sudah tidak menggunakan sistem monarki, jejaknya melalui *royal axis* ini masih tetap bertahan. *Royal axis* ini berupa garis lurus yang memanjang menghubungkan istana dengan jaringan kota Paris.



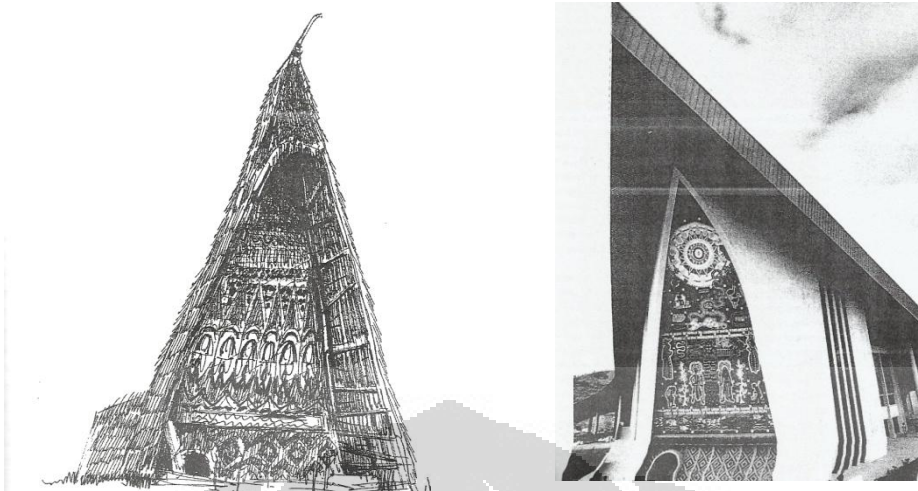
Gambar 2.2: *royal axis* Paris

Sumber: Buku *Architecture, Power, and National Identity*

Perlu juga diperhatikan bagaimana rancangan secara hati-hati membatasi zona untuk publik berkumpul dan area dengan privasi eksklusif. Dominasi bukan hanya dapat tercermin dari besarnya skala arsitektur dan manipulasi atas proporsi dan materialnya saja, namun terpengaruh juga oleh keadaan akses dan isolasinya terhadap publik (Vale, 1992).

Pencarian akan identitas dan penerapannya ke dalam arsitektur bukanlah hal yang sederhana dan mudah. Dalam perancangan gedung parlemen di Papua Nugini misalnya, berbagai pihak berdebat tentang bagaimana bangunan tersebut dapat mencitrakan identitas negerinya. Ada yang menyebutkan perlu menjadi simbol dari kemerdekaan secara politis, harus cocok dengan gaya hidup, iklim, budaya setempat, juga harus dapat berfungsi dan dapat diterima, dalam desain yang tradisional dan bercita rasa seni. Seseorang kemudian mungkin akan bertanya apa artinya harus dapat diterima dan kepada siapa.

Beberapa tokoh penting masyarakat menyatakan pendapatnya masing-masing terhadap pembangunan proyek ini. Narokobi (seorang penulis, ahli dalam perrundangan, visionaries, dll) menyatakan bahwa desain tak hanya harus berasal dari gaya penduduk setempat, tapi memiliki esensi sebagai arsitektur penduduknya. Pious Kerepia (komisaris kepolisian) menyatakan bahwa bangunan harus menggunakan material lokal, memiliki nilai arsitektur tradisional, namun jangan terlihat pamer, dan merefleksikan kekuatan dari bangsa.



Gambar 2.3: Fasad gedung parlemen (kiri) dan Haus Tambaran (kanan) di Papua Nugini

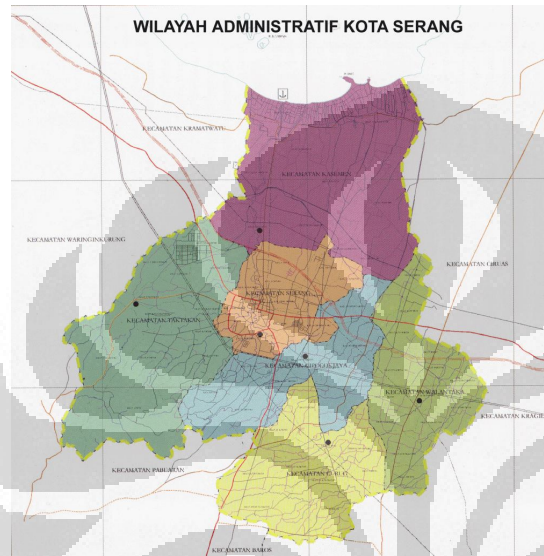
Sumber: Buku *Architecture, Power, and National Identity*

Akhirnya desain yang dipilih mengikuti bentuk arsitektur tradisional setempat. Gedung parlemen akan menjadi simbol dan contoh dari 'Haus man' (*men's house*) di dalam masyarakat. Karena bangunan memiliki kedudukan terhadap beragam budaya, tentunya ia akan menarik makna yang tak terduga. Ia mungkin dapat menjadi simbol dari kekuatan dan demokrasi, mungkin dapat menjadi simbol kebencian terhadap dominasi satu pihak, ataupun sebagai 'Haus man' (*men's house*) dimana perempuan tak bisa hadir didalamnya. Bangunan menjadi produk yang mengkombinasikan berbagai aspek seperti sosial, politik, teknologi, seni, dan lain sebagainya (Vale, 1992).

## BAB 3

### PROFIL DAN SEJARAH KOTA SERANG

#### 3.1 Profil Kota Serang



Kota Serang terletak di Provinsi Banten dan merupakan salah satu dari delapan kabupaten dan kota di Provinsi ini. Kota Serang dibentuk dari hasil pemekaran kabupaten Serang dan saat ini telah resmi menjadi ibukota Provinsi Banten.

Gambar 3.1: Wilayah Kota Serang

Sumber: [www.serangkota.go.id](http://www.serangkota.go.id)

Pada pasca reformasi politik, Kota Serang secara administratif dibentuk pada tanggal 10 Agustus 2007 berdasarkan UU nomor 32 tahun 2007. Kota Serang terdiri dari lima kecamatan yaitu, Kecamatan Serang, Kecamatan Kasemen, Kecamatan Curug, Kecamatan Cipocokjaya, Kecamatan Walantaka dan Kecamatan Taktakan. Kota Serang memiliki luas wilayah 266,77 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk berkisar 523.384 jiwa. Kota Serang berbatasan dengan laut Jawa di bagian utara, serta Kabupaten Serang di bagian barat, timur, dan selatan.

Penduduk Kota Serang mayoritas memeluk agama Islam. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia, Sunda, dan Jawa Banten. Kota Serang memiliki logo dengan bentuk dasar segi enam yang melambangkan enam kecamatan, rukun iman, dan kegigihan masyarakat Serang. Sedangkan didalamnya terdapat gambar bintang yang melambangkan rukun Islam dan asas

Ketuhanan Yang Maha Esa. Gapura Kaibon merupakan ciri khas Banten yang menjadi bagian dari sejarah Banten, gapura ini juga melambangkan posisi kota Serang sebagai pintu gerbang Provinsi Banten serta kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Semboyan Kota Serang adalah Kota Serang Madani.



Gambar 3.2: Logo Kota Serang

Sumber: [www.serangkota.go.id](http://www.serangkota.go.id)

### 3.2 Sejarah serta Perkembangan Pemerintahan di Serang

Wilayah Serang memiliki sejarah yang cukup panjang sebelum akhirnya menjadi kota seperti sekarang ini. Pemilihan Serang sebagai ibukota provinsi Banten tentu bukan tanpa keterkaitan dengan masa lalu Serang yang dulu memiliki fungsi sebagai pusat pemerintahan. Kata “Serang” sendiri muncul pada jaman kesultanan Banten, saat itu Serang adalah salah satu wilayah Banten yang merupakan wilayah pertanian (persawahan). Menurut Hussein Djajadiningrat, Serang berarti “sawah atau ladang padi”, dan seserangan memiliki arti pergi ke sawah, memeriksa dan mengedarinya (Untoro, 2006). Dari pernyataan tersebut dapat diketahui dahulu Serang hanyalah salah satu wilayah pedalaman Banten yang berfungsi sebagai area pertanian saja, dan belum menjadi pusat bagi kegiatan masyarakat seperti sekarang ini. Saat ini pun Serang masih memiliki areal pertanian yang luas, meski telah berkembang sebagai kota. Pada gambar di bawah ini terlihat lansekap kota yang masih terdiri dari kampung-kampung dan sawah yang luas.

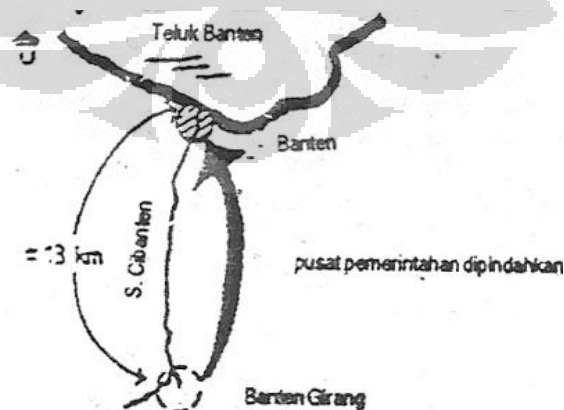




Gambar 3.3: Lansekap Karesidenan Banten (1872)

Sumber: kitlv.pictura-dp.nl

Dalam sejarah Banten, kerajaan awal yang diketahui berkembang adalah kerajaan Hindu-Sunda yang terletak di Banten Girang, yang sekarang dikenal sebagai kampung Sempu, kecamatan Serang, dan berjarak kurang lebih tiga kilometer dari pusat Kota Serang. Kemudian kerajaan ini ditaklukan oleh Sunan Gunung Jati dan putranya hingga akhirnya terbentuklah kesultanan Banten yang terletak di wilayah yang sekarang dikenal dengan sebutan Banten Lama, kecamatan Kasemen Kota Serang. Kesultanan Banten mencapai masa jayanya pada pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, pada saat itu pelabuhan Banten sangat ramai oleh pedagang nusantara dan mancanegara, sektor pertanian dan militer Banten pun maju



Gambar 3.4: Perpindahan pusat pemerintahan ke Banten (Abad ke-15)

Sumber: Buku Sejarah Perkembangan Arsitektur Kota Islam Banten

Perpindahan pusat pemerintahan ke Serang terjadi setelah penaklukan kuasa Kesultanan Banten oleh pemerintah Hindia Belanda. Di dalam sejarah disebutkan bahwa pada akhir abad ke-18 pemerintahan kesultanan telah menuju keruntuhannya karena sering terjadi perebutan tahta dalam lingkungan keluarga Sultan. Pada tahun-tahun itu juga pemerintahan Hindia Belanda dibentuk di tanah air, namun Kesultanan Banten tidak mau mengakui kekuasaan pemerintah kolonial ini. Puncak pertikaian antara Banten dengan pemerintah kolonial adalah ketika Gubernur Jenderal H.W. Deandels memerintahkan Sultan Banten untuk menyerahkan seribu rakyat untuk membangun pangkalan angkatan laut di Ujung Kulon. Permintaan ini ditolak oleh Sultan karena kerja paksa telah menelan banyak korban jiwa. Kemudian terjadilah peristiwa pembunuhan utusan Belanda di Keraton Surosowan yang akhirnya menyulut peperangan serta penaklukan Kesultanan Banten.

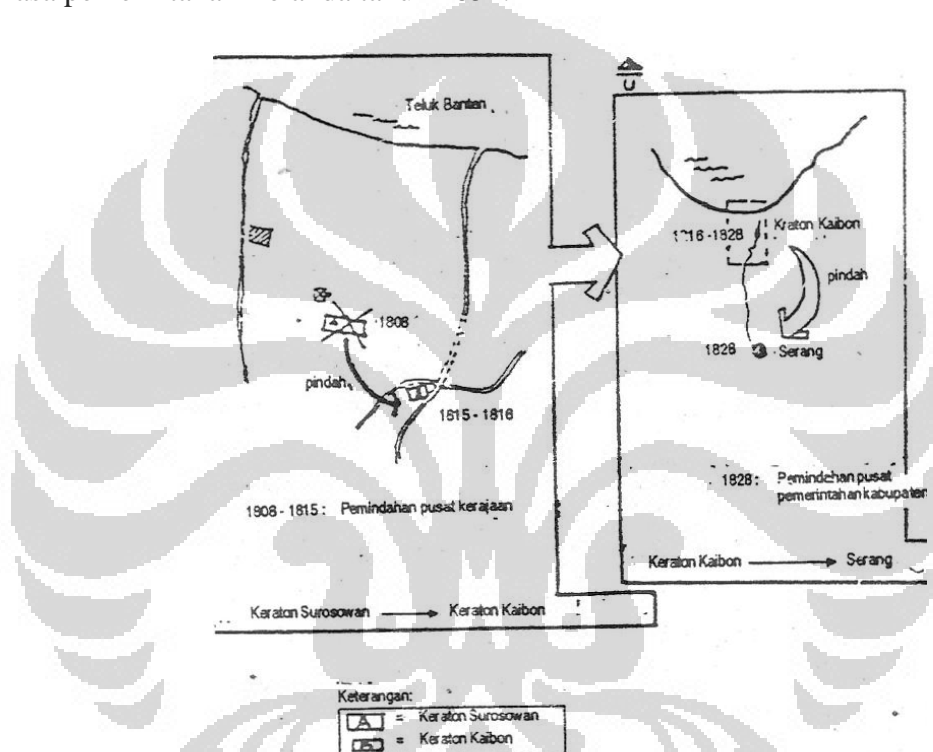
Setelah peristiwa itu, segala kekuasaan Sultan Banten dihapuskan, dan kedudukan Sultan menjadi pegawai pemerintah kolonial. Kemudian meletuslah pemberontakan di Banten yang melawan pemerintah kolonial. Karena Sultan dicurigai memiliki andil dalam pemberontakan ini, akhirnya Keraton Surosowan pun dihancurkan. Sultan pun akhirnya tinggal di Keraton Kaibon. Keraton ini pun sempat menjadi kantor Bupati sebelum akhirnya dihancurkan juga oleh Belanda. Kehancuran keraton terlihat pada gambar di bawah ini, yang tersisa dari keraton hanyalah gerbang/gapuranya saja.



Gambar 3.5: Kaibon Setelah Penghancuran (Gerbang Kaibon) Tahun 1846

Sumber: kitlv.pictura-dp.nl

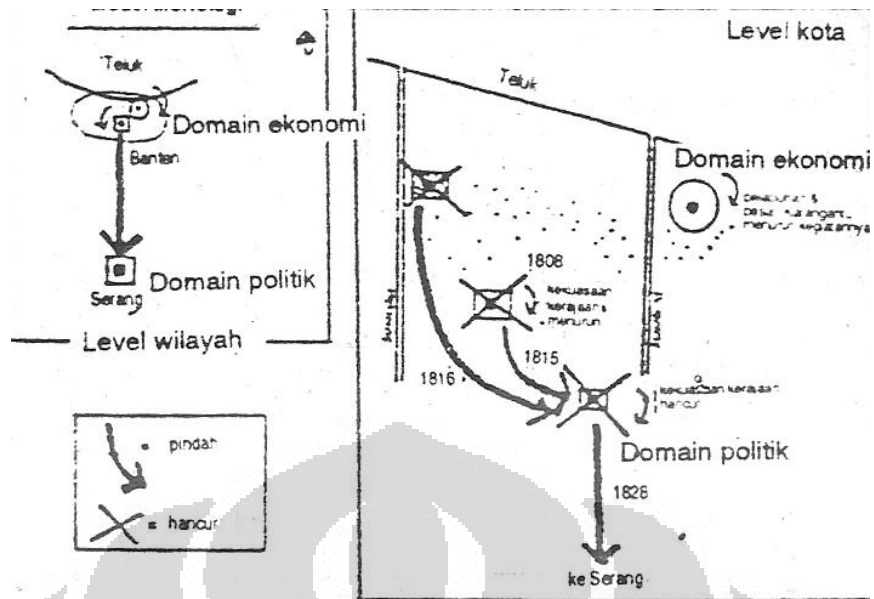
Untuk melemahkan perlawanan dan pemberontakan rakyat, maka wilayah Banten pun dibagi menjadi tiga yang setingkat dengan kabupaten, yaitu Banten Hulu, Banten Hilir, dan Anyer yang diawasi oleh seorang *prefek* di Serang. Pada tahun 1813 pemerintahan Belanda digantikan oleh Inggris, dibawah pimpinan Raffles, wilayah kesultanan Banten dibagi menjadi 4 wilayah, yaitu Banten Lor, Banten Kidul, Banten Tengah dan Banten Kulon dan Serang menjadi ibukota Karesidenan Banten. Dan pembagian wilayah ini dipergunakan kembali pada masa pemerintahan Belanda tahun 1854.



Gambar 3.6: Runtuhnya Kesultanan Banten dan perpindahan pusat pemerintahan ke Serang

Sumber: Buku Sejarah Perkembangan Arsitektur Kota Islam Banten

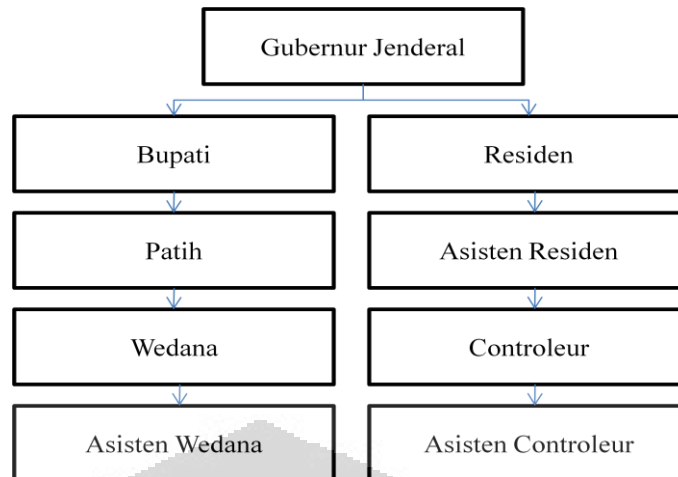
Ketika Kesultanan Banten ditaklukan oleh pemerintahan kolonial Belanda, pusat pemerintahan yang baru kemudian dibangun di Serang. Alasan pemindahan pusat pemerintahan ke Serang adalah karena saat itu pemerintah kolonial ingin menjadikan bagian pesisir utara Banten sebagai benteng pertahanan karena dikhawatirkan bangsa Eropa lain (Inggris) akan merebut kawasan Hindia Belanda dari pemerintah kolonial Belanda.



Gambar 3.7: Runtuhnya Kota dan Kesultanan (Abad ke-19)

Sumber: Buku Sejarah Perkembangan Arsitektur Kota Islam Banten

Dari segi jarak, Serang berada tidak terlalu jauh dengan pusat kesultanan terdahulu. Hal ini untuk mengurangi kemungkinan pemberontakan rakyat dan dapat mendorong perpindahan rakyat ke sekitar pusat yang baru. Perpindahan ini juga diikuti dengan pemilihan adik Sultan sebagai asisten Bupati Serang dan pembangunan rumah dinas di Serang. Dengan perpindahan ‘tokoh’ ini diharapkan masyarakat juga dapat dengan suka rela pindah dan tinggal di pusat yang baru. Sejak kehancuran Surosowan dan kekuasaan yang direbut kaum kolonial, Sultan tinggal di Keraton Kaibon yang juga menjadi kantor Bupati, namun hal ini tidak berlangsung lama. Seluruh fungsi gedung pemerintahan akhirnya dipindahkan ke Serang. Residen dipimpin oleh orang berbangsa Belanda, baru pada tahun 1903 kursi Residen ini diduduki oleh kaum pribumi. Pada saat penaklukan kesultanan banyak tokoh Banten yang dibuang ke berbagai tempat baik di nusantara maupun luar negeri. Namun, setelah diberlakukannya politik etis, beberapa orang Banten ini ditarik kembali ke tanah Banten.



Gambar 3.8: Struktur Birokrasi Pemerintahan Hindia Belanda

Sumber: Buku Sejarah Indonesia

Pada gambar diagram di atas terlihat bahwa kedudukan Bupati dan Gubernur berada di bawah Gubernur Jenderal. Banten merupakan karesidenan yang dipimpin oleh residen dari golongan bangsa Eropa dan Serang dipimpin oleh Bupati yang biasanya merupakan bangsa pribumi.

Menurut Yadi dalam penelitiannya tentang Serang, kota Serang tidak dibangun secara bersamaan dan serempak, melainkan secara bertahap, namun saat ini belum diketahui bangunan apakah yang dibuat terlebih dahulu. Pembangunan Kota Serang dilakukan dan direncanakan oleh pemerintah Hindia Belanda. Selain membangun gedung pemerintahan seperti kantor Residen dan Bupati dan asisten Bupati, Belanda juga membangun fasilitas umum seperti gereja dan masjid. Di sekitar alun-alun terdapat kantor dan tempat tinggal Residen dan Bupati (wawancara, Yadi peneliti sejarah Banten).

Hal ini merupakan ciri dari kota rancangan pemerintah kolonial pada umumnya, yaitu pusat pemerintahan biasanya ditempatkan di kota-kota yang tidak memiliki fungsi perdagangan. Di sekeliling alun-alun terdapat rumah Bupati dan para pejabat lain yang tampak menonjol dari lingkungannya, dan di sekitarnya terdapat pula perkantoran dan rumah asisten residen. Rumah dan kantor Bupati menjadi replika dari tempat tinggal penguasa tertinggi (raja) bangsa pribumi dan menghadap ke arah alun-alun. Tidak jauh pula dari alun-alun terdapat rumah-

rumah pejabat, gedung pengadilan, penjara, dan kantor pos. (Soekiman, 2000:195-197).



Gambar 3.9: Peta Kota Serang Tahun 1945

Sumber: Grote Atlas Van Nederland Oost-Indie

Sebelum menjadi lokasi pembangunan pusat pemerintahan, Serang adalah kawasan pertanian, lokasi kantor Residen sebelumnya adalah lumbung yang terbuat dari bambu. Area dari karesidenan hingga Ciruas adalah bekas kebun tebu yang tanahnya tidak basah sehingga lebih cocok untuk menjadi lokasi pembangunan. Selain itu, area Ciceri-Karesidenan-Benggala merupakan tanah yang telah kurang produktif sehingga pantas untuk dialih fungsikan (wawancara, Yadi peneliti sejarah Banten). Dari pernyataan ini terdapat kecocokan dengan pola kota kolonial yang menempatkan area pusat pemerintahan di tempat yang bukan domain ekonomi (perdagangan). Dan juga pembangunan oleh Belanda tidak mempertimbangkan unsur kosmos dan konotasi ritual seperti pandangan masyarakat pribumi. (Soekiman, 2000:31).

Pemukiman-pemukiman pun bermunculan, pemukiman pegawai pribumi berada di daerah Kaloran dan Kaujon sedangkan kawasan pemukiman Belanda berada di daerah Kantin hingga Pegantungan. Hal ini sesuai pula dengan ciri kota kolonial yang pada umumnya kelompok pemukiman terpisah sesuai kelompok-kelompok suku, dan lain sebagainya. Dan jika dibandingkan dengan kota pantai kuno, kelompok pemukiman di dekat pusat pemerintahan lebih jarang. (Soekiman, 2000:196). Gambar di bawah ini memperlihatkan kondisi kampung di Karesidenan Banten, rumah-rumah penduduk masih sangat sederhana dengan tembok dari bata dan atap rumbia.

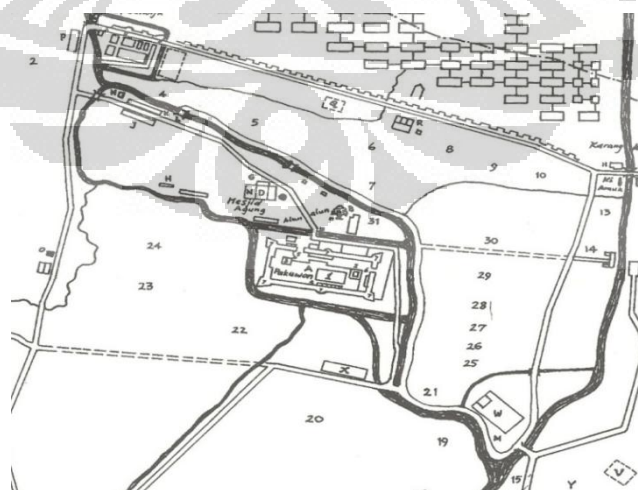


Gambar 3.10:Kampung di karesidenan Banten tahun 1900

Sumber: kitlv.pictura-dp.nl

Kota Serang tak bisa dilepaskan dari nilai kebesaran Kesultanan Banten. Hal ini karena Kota Serang dibangun dari reruntuhan Keraton Surosowan. Material-material ini diangkut ke Serang dan digunakan untuk membangun gedung-gedung pemerintahan (Hakim, 2004). Pernyataan ini sedikit kontras dengan hasil wawancara dengan peneliti sejarah Banten yang mengatakan bahwa reruntuhan Surosowan digunakan hanya untuk rumah dinas asisten Bupati Serang, yang memang adalah adik Sultan Banten sehingga wajar saja apabila pembangunan menggunakan reruntuhan Keraton. Material yang diangkut diantaranya kayu, lantai, dan perabotan-perabotan. Sedangkan gedung-gedung lainnya dibangun bersumber dari kas pemerintah Hindia Belanda.

Letak gedung karesidenan tepat di samping sungai, dan di area itu pula tumbuh pohon-pohon beringin yang pada masa itu digunakan sebagai penanda adanya persediaan air bersih bawah tanah. Beberapa pohon itu masih ada hingga sekarang. Peletakkan berbagai elemen kota seperti gedung pemerintah, masjid dan alun-alun di pusat kota Serang berbeda dari Kesultanan Banten. Di jaman Kesultanan Banten, keraton sebagai pusat pemerintahan berada di sisi selatan alun-alun, masjid tepat di sebelah barat alun-alun. Dan dulu sebagai kerajaan yang bercorak Islam, Banten memiliki karakteristik kota-kota Islam yaitu terdapat masjid besar untuk solat jumat, pasar, istana, lapangan, dan pemukiman-pemukiman etnis (Michrob, 1993).



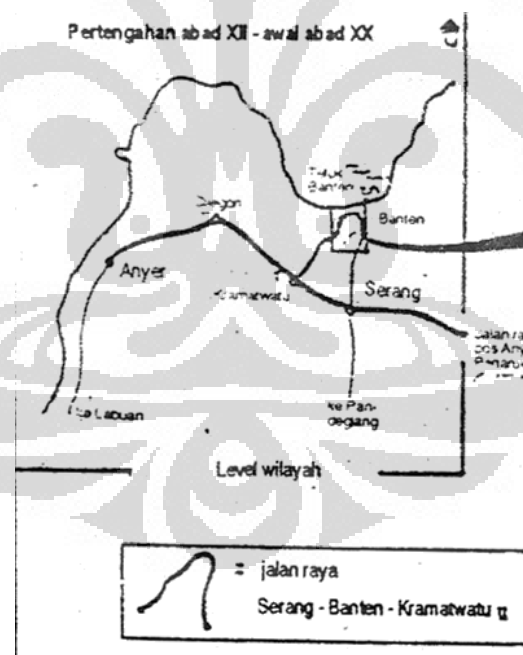
Gambar 3.11: Peta Banten Tahun 1900 (pusat kota)

Sumber: Buku Ragam Pusaka Budaya Banten



Sedangkan di Kota Serang, alun-alun dikelilingi oleh gedung pemerintahan disisi barat dan utara, juga gereja di bagian Utara. Dan masjid letaknya di sebelah timur dan tidak tepat berada di dekat alun-alun (lihat di peta kota Serang). Berdasarkan wawancara, masjid diletakkan agak jauh dari alun-alun ini untuk mencegah keramaian di pusat kota. Padahal penduduk Serang yang dulunya merupakan penduduk Kesultanan Banten memiliki karakter religius yang kuat. Meski nilai toleransi antar agama dan budaya di Banten sejak dulu telah terbangun dan nilai-nilai Islam berada dalam tingkatan normatif. Dari segi budaya, Banten dulu juga terbuka terhadap dengan berbagai budaya lain yang dibawa oleh para bangsa pendatang di Banten (Ambary, 1998).

Pada masa ini pula, dibangun jalan raya sebagai sarana transportasi. Jalan raya dari Anyer-Panarukan dibangun oleh pemerintah Daendles ditujukan untuk mempermudah jalur komunikasi pos. Serang terhubung dengan Batavia, Cilegon, dan Anyer.



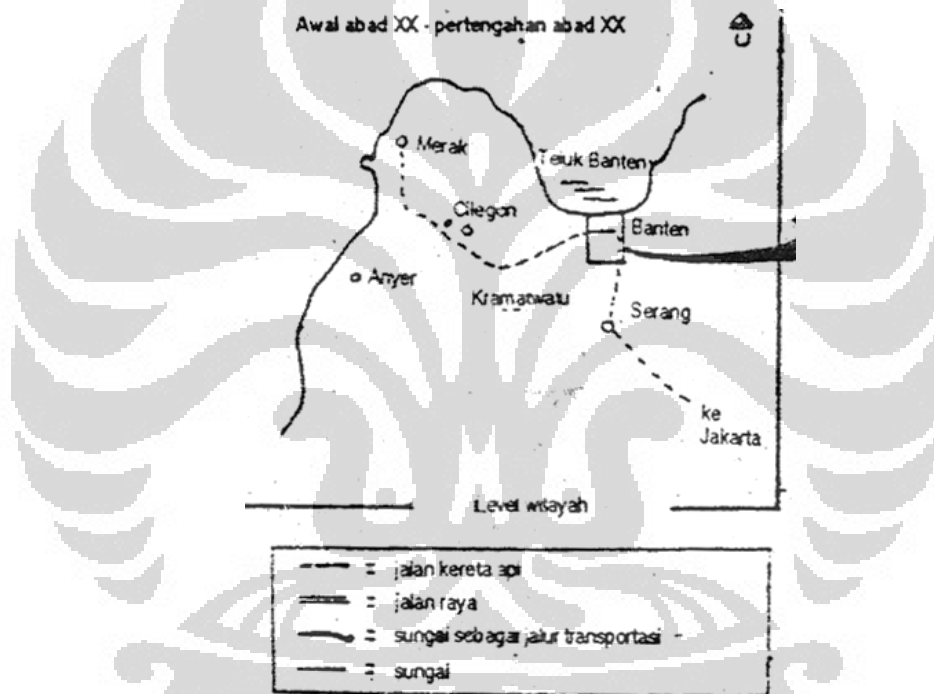
Gambar 3.12: Jalan raya sebagai jalur transportasi utama

Sumber: Buku Sejarah Perkembangan Arsitektur Kota Islam Banten

Terdapat pula jalan sekunder yang menghubungkan Kramatwatu-Banten-Serang. Pada pertengahan abad ke-19 jalan raya sudah menjadi sarana transportasi

yang menggantikan sungai/kanal yang semasa Kesultanan Banten merupakan sarana transportasi utama. (Michrob, 1993:79). Jalan raya ini bertemu di alun-alun Kota Serang. Jalan ini ke arah barat menuju Cilegon dan Anyer, ke arah timur Batavia, ke Utara adalah Banten lama, dan ke arah selatan menuju Pandeglang dan Rangkasbitung.

Jalur transportasi kereta api juga dibuat di awal abad ke-20. Jalur kereta api ini dari Batavia melewati Rangkasbitung-Serang-Banten-Merak. Dipilihnya jalur selatan melewati Rangkas adalah karena Rangkas telah menjadi area niaga serta dari segi keamanan melalui jalur selatan cenderung lebih aman.



Gambar 3.13: Jalur Kereta api (Awal Abad ke-20)

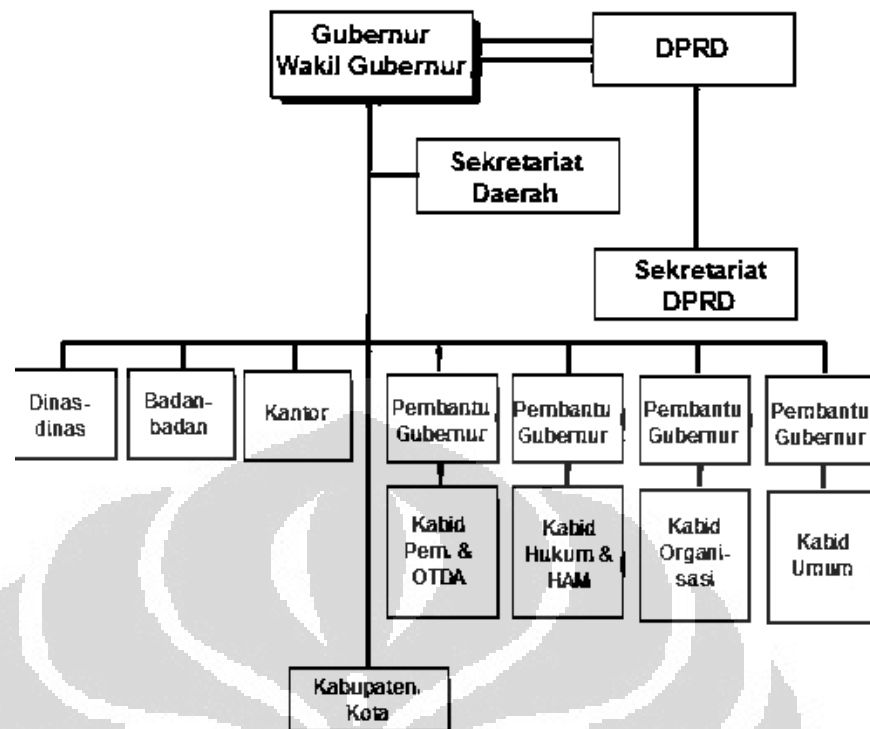
Sumber: Buku Sejarah Perkembangan Arsitektur Kota Islam Banten

Setelah kesultanan Banten ditaklukkan oleh Belanda, banyak masyarakat Banten yang tidak mendukung pemerintahan kolonial ini. Akibatnya tokoh seperti ulama dan jawara lebih dihormati dalam struktur masyarakat Banten. Jawara menjadi tokoh yang membela kehidupan petani miskin dan sering kali melakukan pemberontakan terhadap pemerintah kolonial yang berkuasa. Begitu pula dengan

kaum ulama yang juga turut andil dalam pemberontakan yang terjadi di Banten. Hal ini karena mereka menganggap bahwa pemerintah kolonial adalah golongan kafir yang merebut kekuasaan dari tangan orang muslim sehingga harus diperangi. karena masyarakatnya yang bersifat keras dan tak takut untuk membangkang, munculah istilah Banten-bantahan (Nina H.Lubis, 2004). Penduduk Banten dikenal sangat religius, agresif, dan pemberontak di kalangan masyarakat luar Banten maupun bangsa Belanda.

Pada periode pendudukan Jepang di Indonesia, Banten menjadi Banten *Syuu* yang masih setara dengan karesidenan, dan *syuucokan* (residen) biasanya dijabat oleh orang Jepang. Beberapa jabatan dan aparat pemerintahan sipil yang berasal dari bangsa pribumi tetap dipertahankan agar tidak terjadi kekacauan di masyarakat (Nina H.Lubis, 2004:148). Pada saat itu terjadi perubahan dalam lapisan sosial masyarakat, yaitu lapisan atas orang Jepang, kedua adalah bangsa pribumi dan Timur, lalu orang Belanda dan Eropa di lapisan ketiga. Pada masa pendudukan Jepang-lah bangsa Indonesia mendapat keterampilan di bidang militer.

Setelah kemerdekaan bangsa Indonesia, Karesidenan Banten masuk ke dalam wilayah Provinsi Jawa Barat dan terdiri atas tiga kabupaten yaitu Serang, Lebak, dan Pandeglang. Sejak periode kemerdekaan inilah beberapa jabatan seperti Residen mulai diduduki oleh kaum ulama, contohnya K.H. Achmad Chatib. Pada masa ini para pejabat dan pegawai lama masih dipertahankan karena mereka sebenarnya lebih memahami dan memiliki pengalaman dalam urusan birokrasi pemerintahan. Baru pada tahun 2000 Provinsi Banten terbentuk dan melepaskan diri dari Jawa Barat.



Gambar 3.13: Struktur Pemerintahan Daerah

Sumber: Immamurtaqi.com

Sejak berdiri sebagai Provinsi, Banten dipimpin oleh seorang Gubernur dan pada tahun 2007 kota Serang dibentuk dari wilayah Kabupaten Serang dan berstatus sebagai ibukota Provinsi Banten.

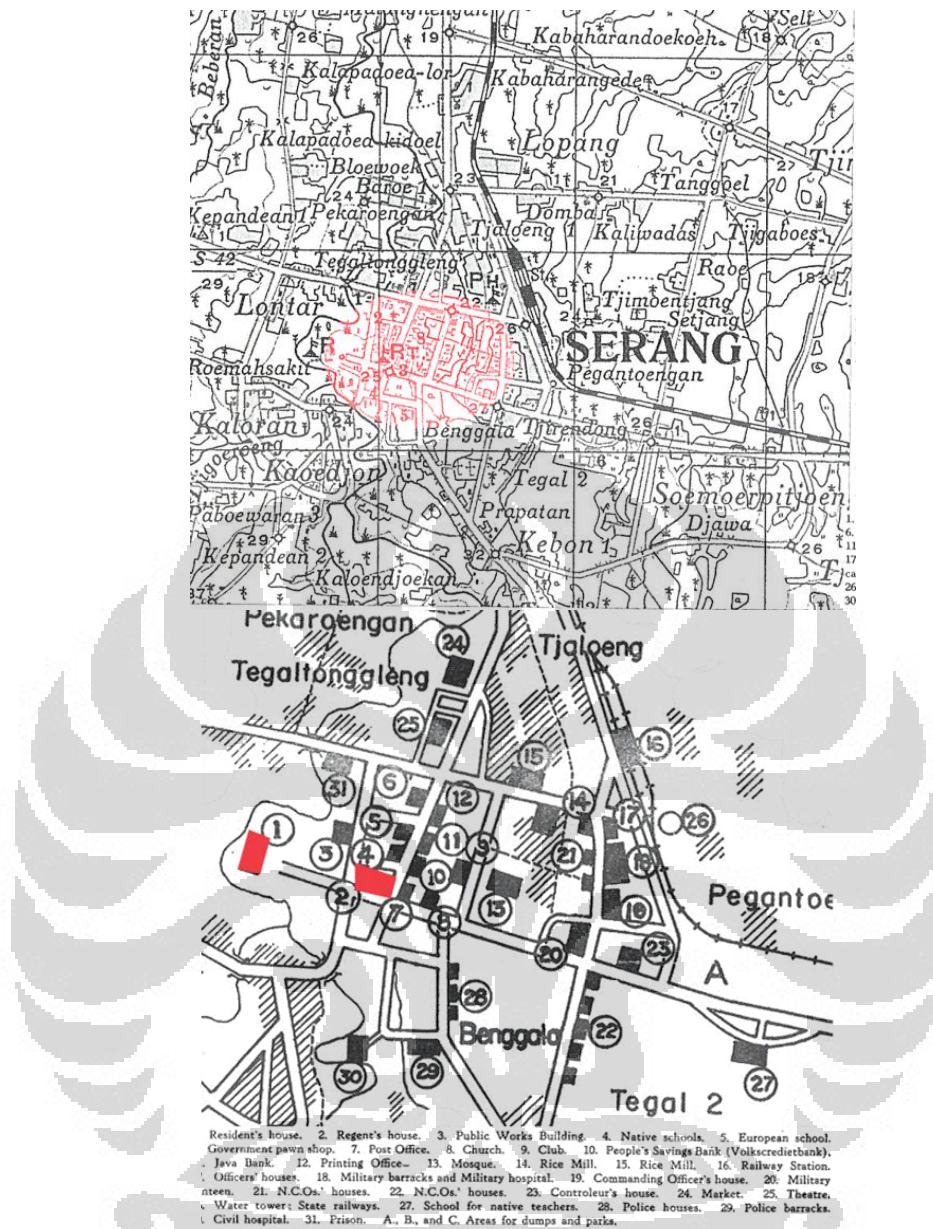
## BAB 4

### STUDI KASUS BANGUNAN PEMERINTAH DI SERANG

Pada penulisan skripsi ini kajian analisis difokuskan pada pusat pemerintahan yang telah dibangun sejak jaman kolonial yang berada di kota Serang, yaitu gedung kantor Gubernur Banten dan kantor Bupati Serang. Meskipun pengamatan yang dilakukan lebih berdasar pada keadaan dan kondisi saat ini, namun akan dipaparkan juga data berupa gambar ataupun sejarah pada masa lalu sebagai bahan pertimbangan analisis. Aspek yang ditinjau adalah keterkaitan antara identitas serta kuasa pada arsitektur bangunan pemerintahan.

#### 4.1 Bangunan Pemerintahan dalam Ruang Kota

Apabila dalam pembentukan pusat kota Kesultanan Banten di Banten Lama dulu masih mengandung unsur mistis dan religius, maka kota Serang yang dibangun oleh pemerintah kolonial nampaknya sudah meninggalkan hal-hal tersebut. Pola kota juga tidak lagi sama seperti yang terdapat di Banten, seperti yang sudah diungkapkan di bab sebelumnya. Namun, pemindahan pusat pemerintahan ini menunjukkan kesamaan dengan kebiasaan masa lampau. Yaitu ketika suatu daerah ditaklukkan, maka pusat pemerintahan yang baru harus ditempatkan di lokasi lain. Hal ini dalam kepercayaan lokal terkait dengan mistis religi bahwa wilayah yang sudah ditaklukkan tidak memiliki kekuatan magis lagi dan harus dipindahkan. Namun terdapat alasan yang logis bagi pemerintah kolonial untuk memindahkan pusat pemerintahan ini ke tempat lain, yaitu untuk menghindari pemberontakan penduduk setempat di Banten Lama yang loyal terhadap pemerintahan terdahulu dan tidak menginginkan adanya penjajahan di tanah mereka. Dan juga keinginan bangsa kolonial untuk menjadikan kota bekas kesultanan sebagai benteng pertahanan karena posisinya yang dekat dengan pantai utara Jawa.



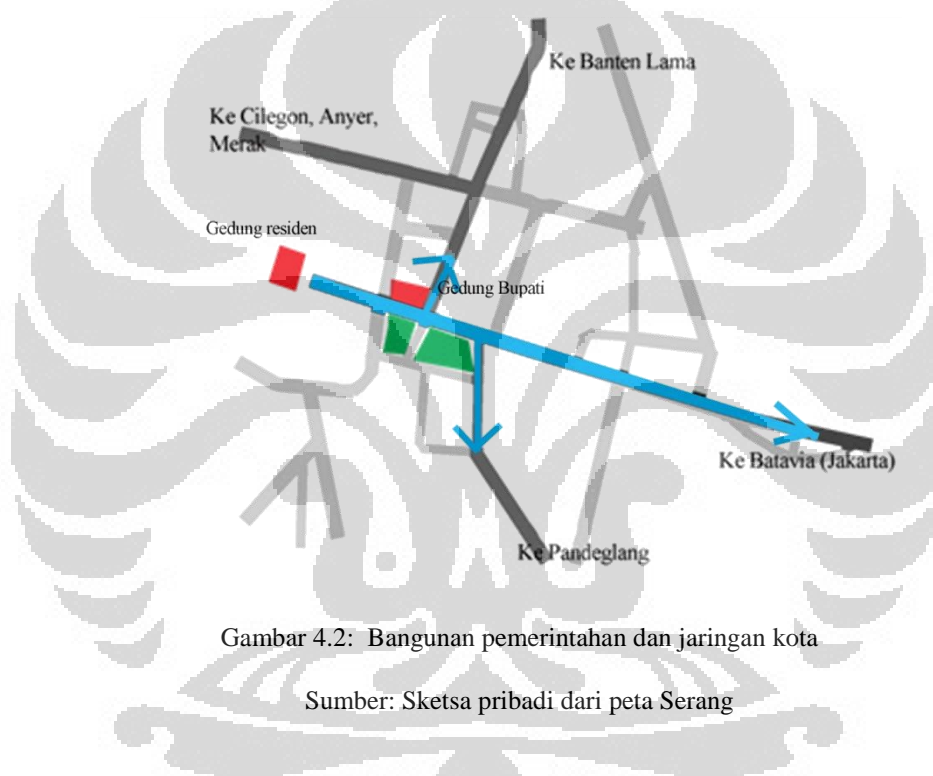
Gambar 4.1: Peta Serang tahun 1945

Sumber: Grote Atlas Van Nederland Oost-Indie

Dalam gambar peta di atas, bangunan pemerintahan ditandai dengan warna merah, yang paling barat adalah gedung residen (sekarang kantor Gubernur) dan di sampingnya adalah kantor Bupati Serang. Pemilihan kedua bangunan ini sebagai studi kasus adalah karena bangunan kolonial ini tetap berfungsi hingga saat ini sebagai bangunan pemerintah. Dan juga penelusuran tentang identitas dan kuasa yang berubah dari kolonial hingga pemerintah

sekarang, sesuai dengan tujuan penulisan yang juga ingin menelusuri pengaruh perubahan kuasa ke dalam arsitektur.

Apabila bangunan pemerintahan ini ditinjau dari keterhubungannya dengan elemen kota lain dan jaringan yang terbentuk diantaranya, maka dapat dilihat bahwa gedung pemerintahan serta alun-alun menjadi simpul jaringan dari wilayah Banten secara keseluruhan. Alun-alun ini selalu digunakan dalam upacara-upacara dan perayaan penting di kota, hingga saat ini alun-alun menjadi tempat bagi perayaan hari jadi kota, kemerdekaan RI, dan festival-festival budaya.

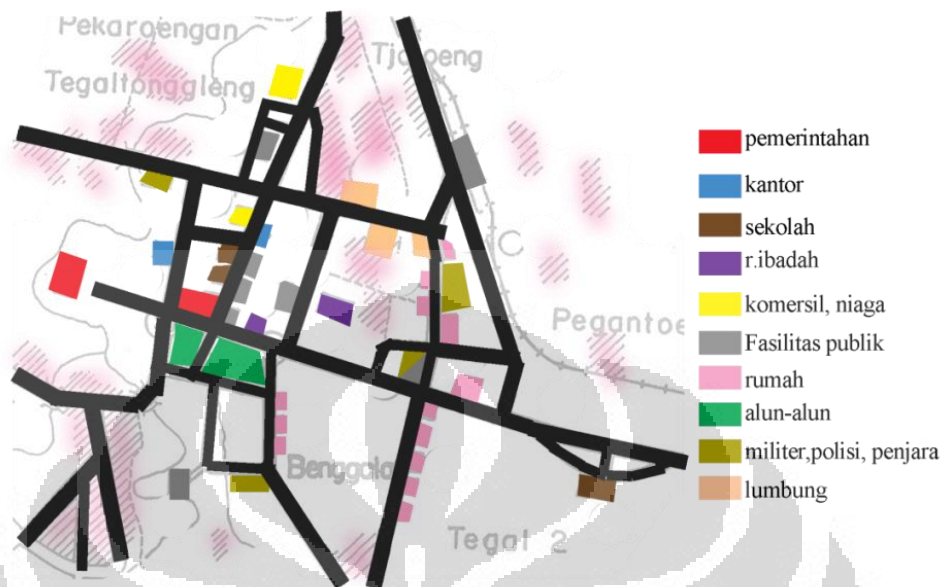


Gambar 4.2: Bangunan pemerintahan dan jaringan kota

Sumber: Sketsa pribadi dari peta Serang

Jalan yang berwarna hitam di dalam gambar menunjukkan jalan utama yang menghubungkan kota Serang dengan daerah-daerah lainnya, sedangkan yang berwarna merah adalah bangunan pemerintah dan yang berwarna hijau adalah alun-alun. Dari gambar tersebut terlihat bahwa jalan yang berujung di kantor Residen Banten adalah jalan utama yang menghubungkan Serang dengan Batavia (sekarang Jakarta). Jalan ini juga merupakan jalan pos Anyer-Panarukan yang diprakarsai oleh Daendels. Di dalam gambar terlihat bahwa gedung Residen Banten di sisi barat seolah menjadi poros bagi jaringan utama yang kemudian mengembangkan jaringan di sekitarnya. Hal ini menunjukkan pentingnya

keberadaan bangunan tersebut dalam ruang kota, yaitu sebagai tempat tinggal dan kantor Residen Banten yang membawahi kuasa atas wilayah di Banten.



Gambar 4.3: Jaringan dan peruntukkan bangunan

Sumber: Sketsa pribadi dari peta Serang 1945

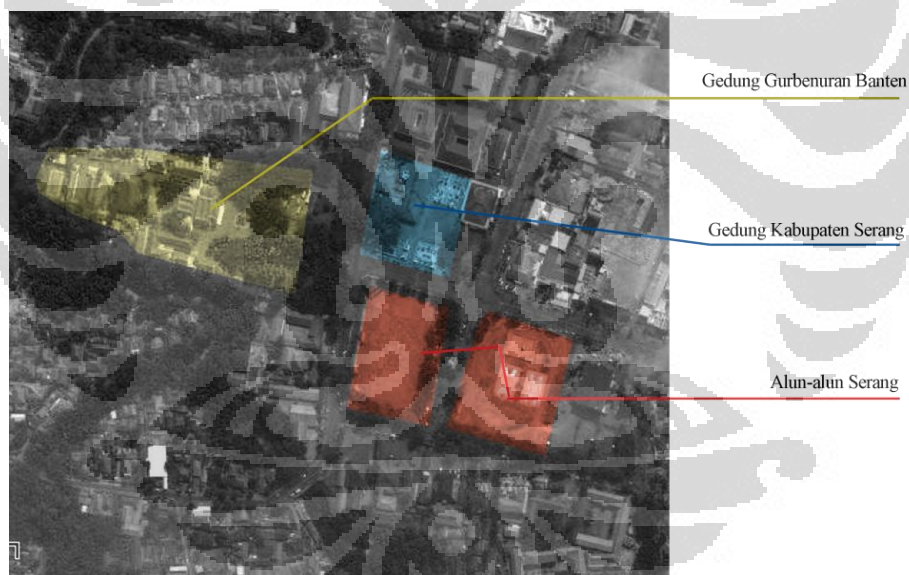
Dari jaringan utama ini, kota berkembang dengan berbagai bangunan dan fasilitas-fasilitas yang mendukung kehidupan publik. Di dalam teori disebutkan bahwa kuasa adalah kemampuan mengontrol dan mengendalikan berbagai aspek dalam kehidupan sosial, dan dalam ruang kota Serang hal ini tergambar dari posisi pusat pemerintahan terhadap jaringan yang kemudian di sekitarnya terdapat berbagai fungsi untuk kepentingan publik.

Di dalam teori sebelumnya juga disebutkan bahwa dominasi sebagai perwujudan kuasa bukan hanya dapat tercermin dari besarnya skala arsitektur, namun juga terpengaruh oleh keadaan akses dan isolasinya terhadap publik. Pada gambar terlihat bahwa gedung Residen Banten memiliki orientasi utama terhadap jalan dan alun-alun. Bangunan ini juga memiliki area yang luas serta jarak yang cukup lebar dengan fungsi bangunan lain. Pada bagian barat dan selatan gedung residen Banten terdapat sungai yang terhubung dengan sungai Cibanten. Sungai ini dulu merupakan akses transportasi meski pada pertengahan abad ke-19 sudah tidak digunakan lagi. Sungai ini juga dapat menjadi media isolasi gedung Residen



terhadap area pemukiman di sekitarnya. Sedangkan di bagian selatan dan timur kota yang dekat dengan jaringan menuju daerah lain terdapat bangunan-bangunan militer yang dapat berguna untuk mengamankan jalur menuju pusat pemerintahan. Hal ini menandakan adanya tingkat pengamanan berbeda dari wilayah di luar dan di dekat pusat pemerintah.

Sekarang ini jalan yang menghubungkan Serang dengan Jakarta telah menjadi jalan arteri kota yang disisinya telah berdiri bangunan-bangunan kepentingan publik seperti kantor polisi, pertokoan, mall, sekolah, rumah sakit, dan gedung-gedung perkantoran dan fasilitas umum lainnya. Bangunan pemerintahan yang didirikan pemerintah kolonial pun masih digunakan hingga saat ini meski mengalami beberapa perubahan dalam wujud fisiknya.



Gambar 4.4: Gedung Gubernur dan Bupati Serang

Sumber: Google maps 2012

Dari gambar terlihat bahwa gedung Gubernur (bekas gedung residen Banten) memiliki skala yang lebih besar dibanding gedung Bupati. Dalam pola ruang yang ada juga terlihat dominasi yang lebih kuat pada gedung Residen Hal ini seolah menyimbolkan bahwa dalam struktur pemerintahan, Gubernur berada pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan kedudukan Bupati.

Sekarang ini, jalanan di bagian depan kantor Gubernur dan Bupati sering menjadi tempat unjuk rasa masyarakat kepada pemimpin daerahnya. Di dalam foto terlihat kejadian saat unjuk rasa berlangsung. Para demonstran berkumpul di depan gerbang sambil menyuarkan orasinya, sedangkan para polisi menghalau dan mencegah massa agar tidak dapat memasuki area gedung dan menimbulkan kekacauan. Dari peristiwa ini terlihat makna bangunan sebagai arena untuk menyuarkan penolakan ataupun kritik terhadap keputusan pemerintah. Serta contoh nyata bahwa kuasa juga akan menghasilkan suatu perlawanan oleh orang-orang yang dikuasainya.



Gambar 4.5: Demo pekerja di depan kantor gubernur (kiri) dan demo warga Pulau Panjang kepada Bupati Serang (kanan) 2012

Sumber: [www.antarafoto.com](http://www.antarafoto.com) & [www.kabarpublik.com](http://www.kabarpublik.com)

## 4.2 Gedung Gubernur Banten

### 4.2.1 Sejarah

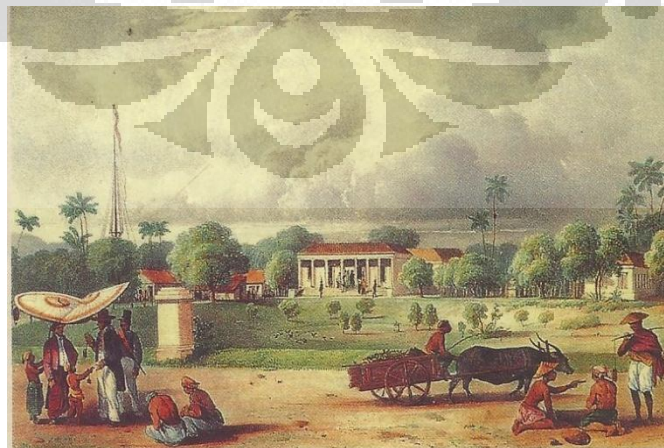
Kantor Gubernur Banten dahulu merupakan kantor Residen Banten (*Residentie van Bantam*). Karesidenan Banten sendiri dibentuk pada tahun 1814, dan kantor ini didirikan berdasarkan surat keputusan pemerintah Hindia Belanda di tahun 1822. Gedung ini dirancang oleh arsitek Belanda bernama Horst dengan ketua pelaksana bernama Letnan Haas. Material yang digunakan didatangkan dari Batavia dan Serang. Sedangkan untuk pintu dan jendelanya berasal dari bekas bangunan di Banten dan Anyer. Berdasarkan Besluit tanggal 31 Agustus 1822 no 86, biaya pembangunan gedung ini sebesar f55.752.23 dan dibebankan pada kas Residen Banten sebesar f21.868. (Edi Widodo, 2007)

Gedung ini menjadi kantor sekaligus tempat tinggal residen Banten yang pada jaman Hindia Belanda selalu dijabat oleh orang berkebangsaan Belanda. Pada masa pendudukan Jepang, gedung ini juga digunakan sebagai gedung pemerintah. Pada tahun 1974 Karesidenan Banten statusnya dirubah menjadi wilayah I Propinsi Jawa Barat dan digunakan sebagai kantor Pembantu Gubernur Wilayah I Propinsi Jawa Barat sampai terbentuknya Propinsi Banten tahun 2000. Kantor Gubernur Banten ini terdiri atas beberapa bangunan, baik bangunan yang dibuat pada masa kolonial juga bangunan-bangunan baru. Bangunan lama berada di area depan, sedangkan yang baru dibangun di belakangnya. Gedung yang merupakan bangunan lama diantaranya bangunan utama, kantor sekda, biro hukum, biro umum, kantor humas dan PKK. Bangunan Utama yang merupakan kantor Gubernur, memiliki 14 ruang yang terdiri dari kantor, kamar tidur, ruang sidang, ruang tamu, ruang dapur dan serambi.

#### 4.2.2 Kuasa dan Identitas

##### Fisik

Bangunan utama kantor Gubernur Banten memiliki unsur arsitektur Eropa dari bentuk persegi panjang, dengan bagian teras yang memiliki delapan buah tiang Tuscan (Edi Widodo, 2007). Bangunan ini memiliki langit-langit dan bukaan-bukaan yang tinggi, di bagian depan bangunan terdapat tangga dan tiga pintu masuk yang berwarna putih.



Gambar 4.6: Gedung Gubernur Banten/Residen Banten (*Residentie van Bantam* abad ke -19)

Sumber: buku Kebudayaan Indis dan Gaya Hidup Masyarakat Pendukungnya di Jawa

Pada lukisan terlihat keadaan bangunan pada masa-masa awal didirikan. Bangunan ini memiliki wujud yang berbeda dari bangunan-bangunan milik pribumi, dan dari fasadnya menunjukkan unsur arsitektur Eropa. Perbedaan inilah yang menjadikan identitas dari pemerintah kolonial tersebut. Pengambilan bentuk Eropa tersebut juga memperlihatkan adanya upaya untuk memberikan sesuatu yang dapat diterima dan dikenali oleh bangsa kolonial sebagai produk budaya mereka.

Dalam lukisan, bangunan terlihat memiliki halaman yang luas dan tidak berpagar. Batas antara halaman bangunan dengan jalanan di depannya hanya diberikan tiang penanda saja dan langsung menghadap jalan tanah di depannya. Terlihat aktivitas penduduk di jalanan, mulai dari kaum priyayi yang sedang berbincang dan budaknya serta pedagang dan buruh angkut yang melintas. Isolasi dalam gedung pemerintahan biasanya digunakan untuk membatasi antara wilayah yang bersifat publik dengan yang privasi kaum pemerintah. Di dalam lukisan ini tidak terlihat isolasi bangunan pada bagian depan, meski diketahui dari gambar peta sebelumnya sisi selatan dan barat memiliki sungai yang dapat membatasi akses ke dalam area bangunan. Penjagaan yang terlihat hanya pada pintu masuk gedung, yaitu terdapat dua orang penjaga serta bangunan di samping kantor residen yang merupakan tempat tinggal para penjaga.



Gambar 4.7: Tampak Depan Gedung Gubernur Banten tahun 1990

Sumber: BP3S

Keadaan sekarang ini, terdapat perubahan-perubahan terhadap wujud bangunan. Perubahan wujud ini tidak semata karena perubahan fungsi dan kebutuhan, namun juga karena upaya untuk memunculkan kembali ciri dan unsur arsitektur lokal ke dalamnya. Hal ini menyiratkan keinginan untuk mengingat kembali kejayaan masa lalu Banten, dan menjadi tanda bahwa pemilik kuasa

telah berganti dari pihak kolonial ke tangan pribumi Banten. Pernyataan ini didukung oleh hasil pengamatan yang telah dilakukan.

Dari hasil pengamatan, perubahan yang terjadi sudah terlihat dari bagian muka area gedung. Jika dulu bangunan dan jalan tidak menggunakan pagar pembatas, maka sekarang sudah terdapat gerbang di bagian depan halaman bangunan. Pintu gerbang ini menjadi akses utama untuk masuk ke area gedung.



Gambar 4.8: Gerbang masuk kantor Gubernur

Sumber: dokumentasi pribadi

Gerbang ini nampaknya mengambil bentuk-bentuk yang mirip dengan gerbang yang berada di kawasan Banten Lama.



Gambar 4.9: Gerbang masuk masjid Agung Banten

Sumber: BP3S

Kemiripan gerbang terletak pada bentuk di bagian atas lengkungan dan dua sisi yang simetris. Meski hanya berupa ornamen dalam gerbang, namun bila dicermati

lebih lanjut gerbang sendiri berarti ‘pintu dan akses untuk masuk’. Gerbang juga dapat menjadi pembatas suatu teritori, dalam hal ini pemberian ciri yang mirip dengan yang terdapat di Banten Lama seolah menjadi tanda bahwa gedung Gubernur merupakan milik pribumi dan berada dalam kuasa pribumi pula. Alasan mengapa ciri Banten-lah yang dimunculkan mungkin karena terdapat pemahaman dan pengakuan secara luas bahwa penduduk merupakan bagian dari penduduk Banten. Kejayaan dan kebesaran yang sempat diraih dalam periode kesultanan Banten tak dapat dilupakan dalam sejarah dan ingatan, dan lalu digunakan sebagai wakil dan contoh dari hasil budaya masyarakat lokal.

Penggunaan ciri arsitektur yang mirip dengan yang berada di Banten Lama tak hanya dari gerbang saja. Ketika sudah masuk ke dalam area kantor Gubernur, terdapat bangunan kolonial yang pada bagian kolom depannya telah diberikan ornamen yang sama dengan kolom yang terdapat di Masjid Agung Banten.



Gambar 4.10: Bangunan samping kantor Gubernur

Sumber: gambar BP3S th.1990 & foto dokumentasi pribadi th.2012

Dari gambar di atas terlihat bahwa ornamen bulat di bagian bawah merupakan tambahan karena pada gambar tampak yang dibuat tahun 1990 ini tidak terdapat ornamen tersebut. Ornamen bulat di bagian bawah kolom rupanya menyimbolkan buah labu yang mirip dengan yang berada di Masjid Agung Banten.



Gambar 4.11: Ruang dalam Masjid Agung Banten

Sumber: BP3S

Kolom yang berada di Masjid Agung Banten dengan bagian bawah berbentuk labu ini merupakan simbol terhadap kepercayaan yang dianut masyarakat. Buah labu yang dalam bahasa Jawa waluh adalah perwujudan dari kata ‘Allah’ dalam bahasa Arab (Juliadi, 2007:164 ,Herrystiadi, 1990:164).

Kemudian pada halaman gedung terdapat pula hiasan-hiasan yang menunjukkan ciri-ciri yang sama seperti di Banten. Pada bagian tengah halaman yang merupakan tiang bendera terdapat hiasan berupa dua buah meriam yang mengingatkan pada keraton Banten yang pada jaman dulu memiliki meriam-meriam di bagian depannya.



Gambar 4.12: Halaman kantor Gubernur (2012)

Sumber: dokumentasi pribadi



Gambar 4.13: meriam Ki Amuk di Banten Lama

Sumber:raddien.com

Di halaman gedung juga terdapat pot-pot dengan ragam hias serupa dengan artefak-artefak yang ditemukan di Banten Lama.



Gambar 4.14: Hiasan pot dengan ragam hias Banten

Sumber:dokumentasi pribadi

Penambahan elemen-elemen arsitektural ini seolah mengingatkan masyarakat pada apa yang terdapat di Banten Lama. Dan seperti yang telah disebutkan dalam teori, bahwa identitas dapat diketahui melalui ciri khusus suatu objek yang merupakan gabungan dari karakteristik sehingga membuatnya dapat dikenali atau diketahui. Penambahan unsur arsitektur lokal sejak pada bagian gerbang kemudian dengan hiasan-hiasan di taman hingga ornamen labu pada kolom-kolom di sepanjang muka bangunan, seolah memberikan wajah bernuansa Banten di atas bangunan kolonial ini. Hal ini juga menjadi penanda bahwa kekuasaan telah bergeser dari bangsa kolonial kembali kepada bangsa pribumi.



Penambahan unsur-unsur lokal ini dapat menjadi wujud dari kebanggaan atas diri dan kejayaan masa lalu kesultanan Banten.



Gambar 4.15: Denah Kantor Gubernur (1991)

Sumber: BP3S dengan perubahan

Apabila masuk ke bagian dalam bangunan utama, terdapat dua ruang utama yaitu ruang tamu dan ruang sidang. Ruang tamu berfungsi sebagai tempat Gubernur mengadakan pertemuan dan audiensi dengan tamunya.



Gambar 4.16: Ruang tamu kantor Gubernur (2012)

Sumber: dokumentasi pribadi

Jika diadakan audiensi, Gubernur dan wakilnya duduk di kursi bagian tengah. Di belakang kursi Gubernur terdapat rangka Badak Bercula Satu yang merupakan hewan langka yang berhabitat di Banten. Sedangkan di tiap sisi tembok terdapat foto, lukisan dan gambar. Di pintu menuju ruang sidang terdapat foto presiden dan

wakilnya beserta kaligrafi dan dua buah jam bergaya Eropa. Sedangkan di bagian pintu masuk terdapat foto Gubernur dan wakilnya berikut dengan dua buah meja rias dan cermin.



Gambar 4.17: Ruang tamu kantor Gubernur (2012)

Sumber: dokumentasi pribadi

Pada sisi tembok samping terdapat lukisan dan foto yang menggambarkan keadaan Banten pada masa silam. Dalam foto di atas, terlihat lukisan di samping kiri yang menggambarkan keadaan Karesidenan Banten pada era kolonial.



Gambar 4.18: Ruang sidang kantor Gubernur (2012)

Sumber: dokumentasi pribadi

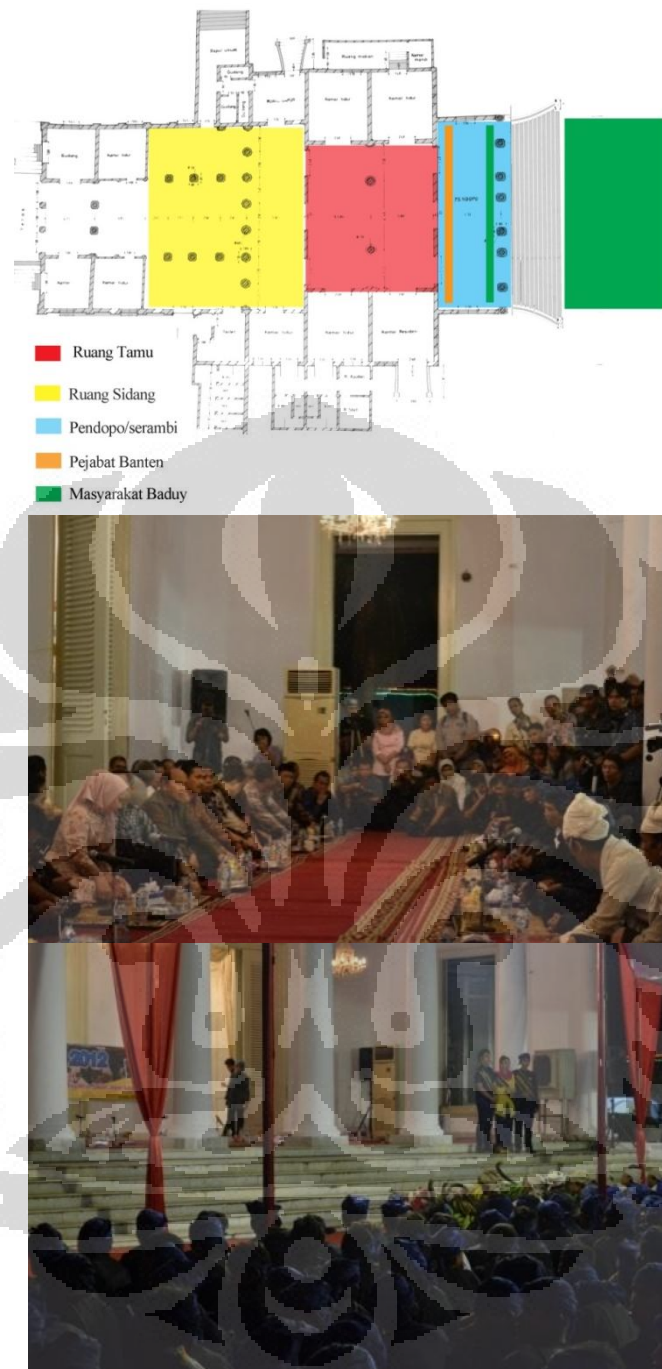
Ruang utama berikutnya adalah ruang sidang. Ruang ini dapat digunakan sebagai ruang rapat, ruang pertemuan, hingga acara-acara penting lainnya seperti pelantikan pejabat daerah. Di sepanjang dinding ruangan ini juga terdapat foto-

foto dan lukisan masa silam Kota Serang dan Banten. Berdasarkan wawancara, di ruang ini dulu juga terdapat foto-foto para residen yang pernah memimpin Banten meski sekarang foto-foto tersebut telah dipindahkan ke bagian arsip. Pemberian gambar-gambar ini secara langsung dapat memperlihatkan sejarah dan perkembangan kota, dan memberi gambaran tentang identitas pemilik kuasa. Walaupun bangunan ini juga mengingatkan tentang penjajahan bangsa asing, namun bangunan masih tetap berfungsi sama dengan kompensasi perubahan dan penambahan di berbagai bagian sebagai tanda dari kepemilikan kuasa.

### **Penggunaan**

Dalam aspek ini akan dibahas mengenai keterkaitan bangunan terhadap makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam penggunaannya di masyarakat. Serta melihat keterkaitan penggunaan bangunan dengan teori kuasa Anderson yang menyatakan bahwa upacara-upacara yang dilakukan oleh kaum penguasa Indonesia adalah upaya untuk mengkonsentrasikan dan memamerkan kuasa.

Salah satu contoh nyata bahwa gedung Gubernur Banten memiliki arti penting dalam tradisi masyarakat adalah pada perayaan Seba Baduy. Seba Baduy merupakan sebuah tradisi rutin yang dilakukan setiap tahun sebagai wujud nyata kesetiaan penduduk Baduy kepada negara yang dilaksanakan kepada pemerintah setempat, dimulai dari Bupati Lebak, Pandeglang, Gubernur dan Bupati Serang. Pada acara ini para tokoh masyarakat di Baduy memberikan laporan tentang daerahnya, harapan serta permasalahan yang ada sembari menyerahkan hasil bumi/ hasil panen tahun ini. Perayaan Seba juga merupakan bentuk silaturahmi kepada pemerintah setempat yang telah dilakukan sejak sebelum kemerdekaan RI. Pada acara Seba Baduy tahun 2012, bagian serambi dari kantor Gubernur dapat digunakan sebagai tempat audiensi antara pejabat pemerintah dengan masyarakatnya. Foto ini diambil ketika acara tahunan Seba Baduy dilaksanakan di Serang.



Gambar 4.19: Seba Baduy 2012 di kantor Gubernur

Sumber: dokumentasi pribadi, denah BP3S

Pada acara Seba Baduy yang dilakukan di serambi gedung Gubernur Banten, para tokoh masyarakat suku Baduy dan jaro-jaronya (kepala desa) duduk di atas lantai berhadapan dengan para tokoh pejabat di Banten. Mereka duduk sama rendah dan tak ada perbedaan signifikan yang ditonjolkan oleh pemilik

kuasa. Para penduduk Baduy lainnya duduk berkumpul di halaman Gedung mendengarkan perbincangan antara pihak pemerintah Banten dan tokoh adat dan petinggi Baduy. Sedangkan hasil panen yang dibawa untuk diserahkan kepada pemerintah Banten diletakkan di halaman gedung, di depan tempat para masyarakat Baduy duduk.

Para tokoh masyarakat Baduy melaporkan situasi sosial kemasyarakatan, keamanan, hasil pertanian serta keadaan lain yang terjadi di desa selama setahun terakhir dan juga berdiskusi tentang kesulitan yang tengah dihadapi dan permintaan kepada pemimpin Banten. Acara ini dapat menjadi simbol dari pengakuan masyarakat terhadap kuasa pemerintah dan senantiasa menjaga silaturahmi dan komunikasi.

### **4.3 Gedung Bupati Serang**

#### **4.3.1 Sejarah**

Kantor Bupati di Serang dibangun setelah keraton Kaibon tidak lagi difungsikan sebagai kantor Bupati. Dibangun seiring dengan pemindahan kota dari Banten Lama ke Serang pada tahun 1800-an. Berdasarkan besluit tanggal 25 Oktober 1904, kantor Bupati selesai dibangun pada tahun 1826 (Edi Widodo, 2007). Hingga saat ini bangunan masih digunakan sebagai kantor dan tempat tinggal Bupati Serang.

#### **4.3.2 Kuasa dan Identitas**

Gedung kantor Bupati Serang memiliki ciri bangunan kolonial. Pada bagian depan bangunan terdapat pendopo yang ditopang dengan pilar-pilar bulat. Pendopo memiliki 32 kolom yang bergaya Tuscan yang berwarna putih sedangkan atapnya berbentuk limasan (Edi Widodo, 2007).



Gambar 4.20: Gedung kantor Bupati Serang (2012)

Sumber: Dokumentasi pribadi

Seperti bangunan-bangunan kolonial umumnya, gedung memiliki dinding yang tinggi, kurang lebih empat meter. Sama halnya dengan gedung Gubernur Banten, terdapat perubahan-perubahan dalam wujud bangunan.

Perubahan pertama adalah penggunaan elemen gerbang yang menggunakan bentuk seperti gerbang yang terdapat di Banten Lama. Pada gedung Bupati Serang, gerbang yang digunakan adalah gerbang Kaibon. Keraton Kaibon dulu sempat menjadi kantor Bupati sebelum dipindahkan ke Serang.



Gambar 4.21: Gerbang kaibon di kabupaten(kiri), gerbang keraton kaibon

Sumber: BP3S dan Tropenmuseum

Namun gerbang ini tak hanya digunakan di kantor Bupati, hampir seluruh bangunan kantor dinas pemerintah, sekolah, rumah sakit, dsb, menggunakan gerbang yang sama. Penggunaan gerbang ini tertulis dalam peraturan daerah kabupaten Serang. Gerbang Kaibon juga tergambar dalam logo kota Serang, yang

menyimbolkan kota Serang yang menjadi pintu gerbang provinsi Banten dan sebagai ciri khas yang menjadi bagian dari sejarah Banten. Dan sama seperti di halaman gedung kantor Gubernur, di teras pendopo kabupaten juga terdapat hiasan-hiasan dengan ragam hias seperti artefak di Banten Lama.



Gambar 4.22: Hiasan pot di pendopo kabupaten

Sumber: Dokumentasi pribadi

Penambahan dan penggunaan elemen ini lagi-lagi menandakan adanya upaya untuk menunjukkan produk budaya Kesultanan Banten sebagai perwakilan dan pengakuan bersama atas kejayaan masa silam.

Di halaman pendopo kantor Bupati terdapat relief yang menggambarkan pembentukan kota Serang dari reruntuhan Surosowan. Relief ini dibuat sekitar tahun 1990 oleh seorang seniman dan pemahat Banten. Di dalam relief diperlihatkan seolah bangsa pribumilah yang membangun Serang dan tak terlihat keberadaan sosok pemerintah kolonial di dalamnya (gambar di halaman berikutnya). Di ujung paling kiri terdapat relief yang menggambarkan seorang penduduk yang mengangkat batu besar bertuliskan “*gawe kuta baluwarti kalawan kawis (pupuh XXII)*”. Tulisan itu diambil dari Babad Banten yang memiliki arti membangun kota dan benteng dari bata dan karang. Ungkapan tersebut menggambarkan pembangunan kota Kesultanan Banten, yang dulu dikelilingi tembok-tembok dari bata dan karang.



Gambar 4.23: Relief Pembangunan pusat pemerintahan di Serang

Sumber: Dokumentasi pribadi



Kemudian di samping relief tersebut digambarkan para penduduk yang mengambil sisa-sisa reruntuhan keraton, ada yang mengangkut kayu dan batu-batu dari dinding. Material-material ini kemudian diangkut dengan gerobak-gerobak melewati gerbang kota Banten dan menuju suatu daerah yang masih lapang dan hijau. Kemudian di suatu tempat yang memiliki sebuah pohon besar, bangunan-bangunan pemerintahan didirikan dari reruntuhan keraton. Bangunan yang digambarkan adalah gedung Bupati dan gedung Gubernur (dulu Residen). Seseorang dengan kostum priyayi menunjuk ke arah pembangunan gedung, ia berdiri berdampingan dengan ajudan-ajudannya. Keberadaan sosok yang seperti priyayi pribumi ini yang menunjuk ke arah gedung seolah menunjukkan bahwa dirinya berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan. Hanya saja tidak nampak sama sekali sosok orang dengan kostum bangsa kolonial pada relief ini. Catatan sejarah yang ditulis hanyalah tahun “1816”, dan di dalam relief tidak diceritakan alasan mengapa keraton Banten hancur hingga pusat pemerintahan dipindahkan ke tempat yang baru. Pohon yang menjadi cikal bakal penandaan tempat pembangunan masih terdapat di area halaman gedung kantor Bupati Serang hingga saat ini (gambar 4.20)

Sejarah tentang pembangunan kota Serang juga dituliskan dalam salah satu media cetak di Banten yang berbunyi:

“...Berbeda dari kota-kota lain di tanah air yang dibangun pemerintah Belanda. Kota ini memiliki nilai sejarah yang unik dan tak pernah dilupakan orang Banten. Berdasarkan catatan sejarah dan Babad Banten, Kota Serang dibangun dari reruntuhan Keraton Surosowan. Ketika Kesultanan Banten dihancurkan Daendels tahun 1808, seluruh materialnya berupa bata, lantai dan kayunya diangkut ke Serang untuk pembangunan gedung-gedung pemerintahan.” (Lukman Hakim, 2004)

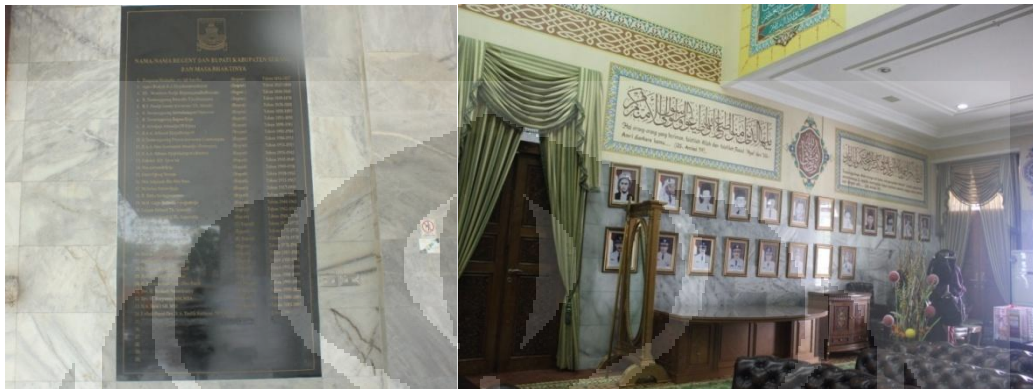
Jika memang benar begitu maka dalam teori kuasa yang disebutkan oleh Anderson, disini terdapat kecenderungan penyerapan kuasa atas ‘yang ditaklukan’ oleh ‘penakluk’. Menurut teori ini, ketika seseorang berhasil mengalahkan lawannya, maka kuasa si lawan akan diserap sehingga menambah kuasa orang yang menang. Dan tanda nyata dari pemilik kuasa adalah kemampuannya untuk mengumpulkan (mengkonsentrasikan) kuasa ke dalam dirinya, bahkan menyerap

aspek-aspek yang berlawanan. Tentu dalam kasus yang terjadi di Banten, pihak kolonial-lah yang sebenarnya menaklukan kuasa Kesultanan Banten. Keraton Surosowan sebagai pusat pemerintahan terdahulu dihancurkan, dan reruntuhannya kemudian digunakan untuk pembangunan gedung pemerintahan yang baru di Serang. Hal ini menyiratkan bahwa kuasa yang lama dihancurkan dan diserap oleh penakluk sehingga tak akan dapat lagi memancarkan kuasanya.

Di dalam relief, terdapat penggeseran keberadaan pemerintah kolonial sebagai pihak yang membangun Serang, sedang pada tulisan terlihat adanya kebanggaan atas Serang yang tidak lepas dari sejarah Kesultanan Banten. Dan diperlihatkan juga penekanan pada nilai-nilai kebesaran Kesultanan Banten yang masih terkandung dalam pusat pemerintahan di Kota Serang. Terdapat kontradiksi lain terhadap pembangunan pusat pemerintahan di Serang ini. Yaitu menurut hasil wawancara dengan salah seorang peneliti sejarah Banten, reruntuhan Surosowan digunakan pada rumah asisten Bupati, bukan pusat pemerintahan secara keseluruhan, karena justru biaya pembangunan berasal dari dana kas pemerintah Hindia Belanda (wawancara Yadi, peneliti sejarah Banten). Kontradiksi ini menunjukkan adanya kecenderungan terhadap pengakuan atas kepemilikan kuasa penduduk Banten di Serang.

Hal ini dapat dikaitkan dengan teori kuasa yang disebutkan oleh Foucault, bahwa pengetahuan selalu terkait dengan kuasa. Dalam hal ini mungkin saja terdapat beberapa pengurangan ataupun penambahan atas kenyataan sejarah yang ada demi alasan-alasan tertentu. Kuasa pada akhirnya terkait dengan pengendalian pikiran orang lainnya, dan segala pengetahuan ketika diterapkan pada dunia nyata, dan memberikan efek yang nyata, akan dapat dirasakan sebagai sebuah 'kebenaran'. Tulisan ini tidak akan membahas tentang apa yang benar atau apa yang dimanipulasi, namun melihat hal tersebut sebagai fenomena yang mempengaruhi makna atas identitas dan kuasa pada lingkungan bangun. Dengan adanya pengetahuan yang tertuang baik dalam relief ataupun wacana di media, keberadaan pusat pemerintahan di Kota Serang akan selalu dikaitkan dengan nilai-nilai kebesaran Kesultanan Banten.

Kemudian apabila masuk ke dalam pendopo gedung kantor Bupati, terdapat tulisan di dinding yang berisi daftar-daftar nama Bupati dari awal pemerintahan kolonial hingga sekarang. Di dinding timur ruang tamu kantor Bupati terdapat pajangan berupa foto-foto para Bupati dari jaman kemerdekaan RI hingga saat ini.



Gambar 4.24: Gedung kantor Bupati Serang (2012)

Sumber: Dokumentasi pribadi

Ruang tamu kantor Bupati telah diubah dari wujud aslinya dengan adanya pengecatan di seluruh penjuru dinding bangunan yang berornamen islam.



Gambar 4.25: ruang tamu dan pintu kantor Bupati Serang (2012)

Sumber: Dokumentasi pribadi

Kaligrafi berupa ayat-ayat suci Al-Qur'an dan motif- motif geometris Islam menghiasi dinding ruangan, bersanding dengan kaca-kaca patri yang tak lagi berfungsi untuk memasukkan cahaya ke dalam ruang. Di dinding sebelah barat

juga terdapat pajangan bergambar Ka'bah. Daun pintu masuk menggunakan kayu berornamen islami dengan tulisan kaligrafi Islam. Hal ini menunjukkan keinginan pemimpin untuk mewujudkan nilai-nilai islam sekaligus identitas Banten yang kuat dengan norma-norma Islam. Meski begitu menurut Hasan Muarif Ambary nilai-nilai Islam di Banten sebenarnya berada dalam tingkatan normatif, sedangkan dari segi budaya masih bercampur dengan unsur-unsur lain, hal ini berlaku juga pada arsitektur. Oleh karena itu perwujudan langsung dari kaligrafi-kaligrafi ini tak langsung diadaptasi dari budaya Banten, namun menjadi murni untuk menunjukkan simbol islami ke dalam bangunan kolonial.

### **Penggunaan**

Salah satu arti penting bangunan dalam penggunaan dan nilai tradisi masyarakat Serang adalah pada perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Pada perayaan ini masyarakat dengan bebas dapat berpartisipasi, mereka berkumpul di Pendopo kantor Bupati dan makan bersama sambil duduk di lantai. Makan bersama ini biasa disebut '*ngeropok*'. Masyarakat saling duduk berhadapan dan makanan di sediakan ditengah ruangan. Acara makan bersama ini dapat menjadi simbol dari rasa syukur dan silaturahmi.



Gambar 4.26: Perayaan Maulud Nabi di pendopo kabupaten tahun 1920

Sumber: kitlv.pictura-dp.nl

Tradisi ini masih bertahan hingga saat ini, namun dengan ditambah acara ceramah-ceramah tausiyah Islam. Penggunaan bangunan sebagai sarana sosial

keagamaan masyarakat menambah identitas maknanya selain dari sebagai bangunan pemerintahan. Selain itu terdapat juga simbol kedekatan antara pemimpin dengan masyarakat. Nilai-nilai Keislaman juga terlihat sebagai karakteristik dan ciri identitas sosial masyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa dari hasil pengamatan terdapat keterkaitan antara perubahan kuasa terhadap arsitektur bangunan pemerintahan. Hal yang terjadi di Serang adalah penambahan beberapa ciri-ciri dari budaya lokal terutama dari Banten Lama. Hal ini juga menjadi tanda bahwa kepemilikan atas kuasa telah bergeser dari bangsa kolonial kembali kepada bangsa pribumi. Penambahan unsur-unsur lokal ini dapat menjadi wujud dari kebanggaan atas diri dan kejayaan masa lalu kesultanan Banten. Selain dari wujud fisiknya, pengaruh kuasa juga dapat dilihat dari adanya gambar-gambar ataupun tulisan yang menjelaskan tentang keberadaan bangunan. Dalam kasus ini, pembangunan pusat pemerintahan di Serang akan selalu dikaitkan dengan nilai kebesaran Kesultanan Banten. Sedangkan identitas yang merupakan gabungan dari ciri dan karakteristik, pembeda, takkan pernah selesai untuk diungkapkan. Dari hasil pengamatan ditemukan upaya-upaya untuk memberikan ciri lokal Banten. Hal ini mungkin disebabkan karena adanya pemahaman dan pengakuan secara luas bahwa penduduk merupakan bagian dari penduduk Banten yang tak dapat lepas dari sejarah Kesultanan Banten.

## BAB 5

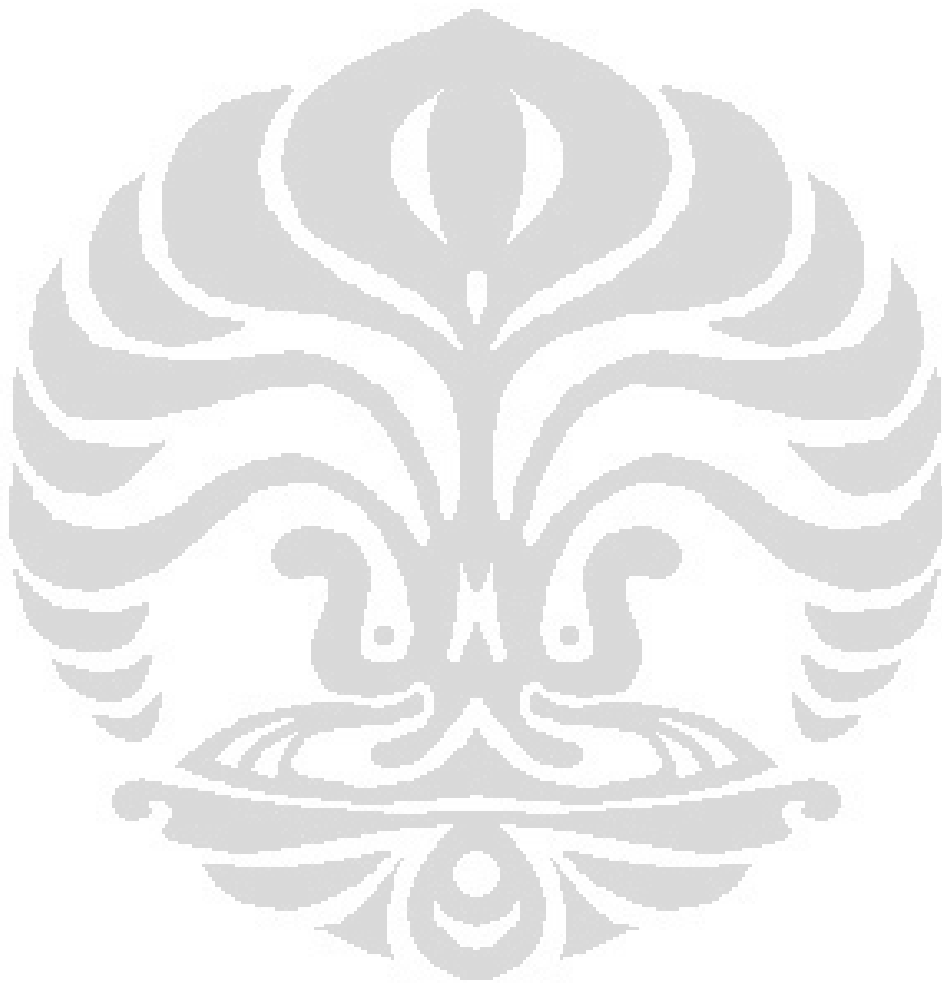
### KESIMPULAN

Arsitektur akan selalu terkait dengan faktor-faktor sosial dalam pembentukannya, termasuk dengan identitas dan kuasa yang mempengaruhinya. Pada studi kasus yang dilakukan di bangunan pemerintahan di Kota Serang, ditemukan beberapa keterkaitan antara arsitektur dengan faktor kuasa dan identitas. Serang sebagai tempat studi kasus memiliki sejarah dengan perubahan kuasa dari pemerintahan Kesultanan Banten kemudian menjadi pemerintah kolonial hingga akhirnya kembali berada di tangan pribumi setelah periode kemerdekaan. Pusat pemerintahan kolonial masih digunakan hingga saat ini, dan sebagai kompensasinya terdapat perubahan-perubahan pada wujud bangunannya.

Dari hasil pengamatan, keterkaitan antara perubahan kuasa terhadap bangunan pemerintahan kolonial di Serang nampak dari penambahan beberapa ciri-ciri dari budaya lokal terutama dari Banten Lama. Penambahan unsur-unsur lokal ini dapat menjadi wujud dari kebanggaan atas diri dan kejayaan masa lalu kesultanan Banten. Selain dari wujud fisiknya, pengaruh kuasa juga dapat dilihat dari adanya gambar-gambar ataupun tulisan yang menjelaskan tentang keberadaan bangunan. Dalam kasus ini, pembangunan pusat pemerintahan di Serang dikaitkan dengan nilai kebesaran Kesultanan Banten.

Sedangkan keterkaitan antara identitas dan arsitektur terlihat dari upaya-upaya yang dilakukan memberikan ciri lokal Banten sebagai pembeda terhadap apa yang telah dibangun oleh pemerintah kolonial dan juga sebagai wakil dari hasil budaya lokal. Penggunaan ciri dari Banten lama mungkin disebabkan karena adanya pemahaman dan pengakuan secara luas bahwa penduduk merupakan bagian dari penduduk Banten yang tak dapat lepas dari sejarah Kesultanan Banten. Identitas dari fungsi bangunan juga tidak semata sebagai tempat pemerintah mengatur wilayahnya, namun juga memiliki nilai-nilai tradisi masyarakat contohnya melalui tradisi Seba Baduy dan Maulud Nabi. Namun tulisan ini tentu tidak dapat menggambarkan tentang identitas secara lengkap

tanpa celah. Identitas, seperti yang disebutkan dalam teori, akan selalu berada dalam tahap proses dan takkan pernah selesai untuk diungkapkan



## DAFTAR PUSTAKA

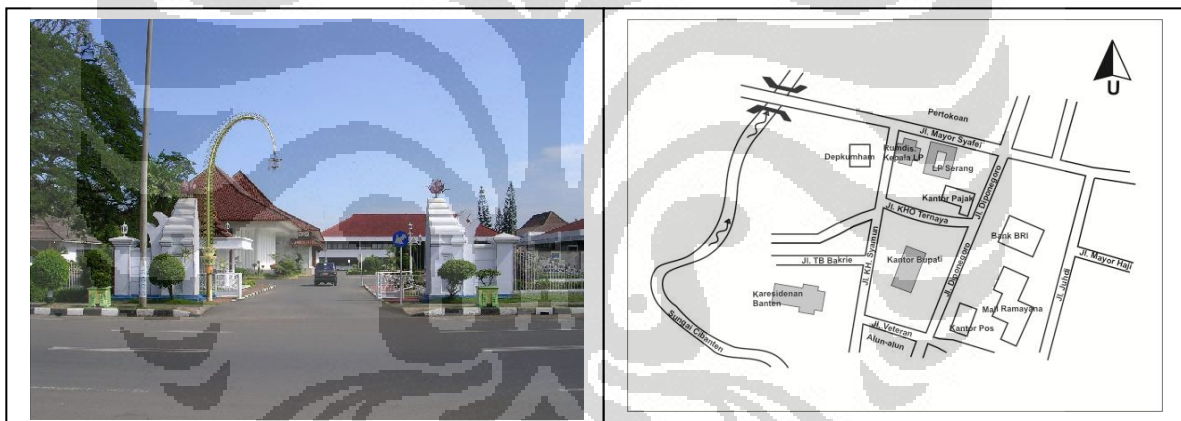
- Ambary, Hasan Muarif. 1998. *Menemukan Peradaban Arkeologi dan Islam di Indonesia*. Jakarta: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional
- Anderson, Benedict R.O'G. 1983. *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. Verso
- Anderson, Benedict R.O'G. 2000. *Kuasa-Kata: Jelajah Budaya-Budaya Politik di Indonesia*. Yogyakarta: Mata Bangsa
- Foucault, Michel. 1977. *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. New York: Vintage Books
- Hakim, Lukman. 2006. *Banten Dalam Perjalanan Jurnalistik*. Pandeglang: Banten Heritage
- Hall, Stuart. 1997. *Representation: Cultural Representations and Signifying Practices*. The Open University
- Juliadi, Prasetya, Soni, dkk.2005. *Ragam Pusaka Budaya Banten*, Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Serang
- Juliadi. 2007. *Masjid Agung Banten*. Serang: Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Serang
- Lasmiyati, dkk. 2006. *Kota dan Kabupaten Dalam Lintasan Sejarah, Runtuhnya Kota Banten Lama dan Perubahan Administrasi Wilayah*. Bandung: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional
- Lubis, Nina H. 2004. *Banten Dalam Pergumulan Sejarah: Sultan, Ulama, Jawara*. IKAPI
- Michrob, Halwany. 1993. *Sejarah Perkembangan Arsitektur Kota Islam Banten*. Jakarta: Yayasan Baluwarti



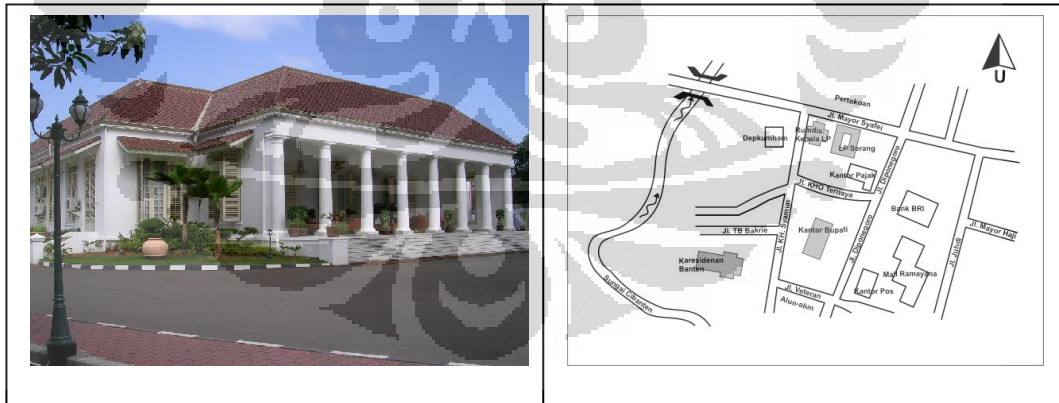
- Rabinow, Paul. 2002. *Pengetahuan dan Metode: Karya-karya Penting Foucault*. Alia Swastika(ed). Jogjakarta: Jalasutra
- Soekiman, Djoko. 2000. *Kebudayaan Indis dan Gaya Hidup Masyarakat Pendukungnya di Jawa (abad XVIII-Medio Abad XX)*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya
- Untoro, Heriyanti O. 2006. *Kebesaran dan Tragedi Kota Banten*. Jakarta: Yayasan Kota Kita
- Vale, Lawrence J. 2008. *Architecture, Power, and National Identity: Second Edition*. Routledge
- Widodo, Edi. 2007. *Optimalisasi Pemanfaatan Gedung-Gedung Bersejarah di Kota Serang-Banten*. Tesis Arkeologi Universitas Indonesia
- Internet
- Dijk, Teun A. Van. *Critical Discourse Analysis*. Ebook. Diakses tanggal 26 Mei 2012
- Damayanti, Rully., Handinoto. *Kawasan “Pusat Kota” Dalam Perkembangan Sejarah Perkotaan di Jawa*. Dimensi Teknik Arsitektur, Vol. 33, No. 1, Juli 2005: 34 – 42. <http://puslit.petra.ac.id/>. diakses 30 April 2012
- Hall, Stuart. *Who needs Identity?*. [www.books.google.co.id](http://www.books.google.co.id). Diakses tanggal 5 Mei 2012
- IIm. *Bupati Pandeglang Terima Seba Baduy*. [humaspdg.wordpress.com](http://humaspdg.wordpress.com). diakses tanggal 30 Juni 2012
- Stets, Jan E, Peter J. Burke. *Identity and Social Identity Theory*. Social Psychology Quarterly 2000, Vol.63, No.3, 224-237. Washington State University. Diakses 27 Maret 2012
- [www.thefreedictionary.com](http://www.thefreedictionary.com). Diakses April 2012
- [www.kamusbahasaindonesia.org](http://www.kamusbahasaindonesia.org). Diakses April 2012
- [www.serangkota.go.id](http://www.serangkota.go.id). Diakses Mei 2012

## Lampiran 1: Data Bangunan (sumber BP3S)

Nama Situs	: Kantor Bupati Dati II Serang		
Nomer Registrasi/Inv.	: 034.01.07.04.09		
Lokasi			
Alamat	: Jl. Veteran		
Desa/Kelurahan	: Kota Baru	Kecamatan	: Serang
Kabupaten/Kota	: Serang	Provinsi	: Banten
Koordinat UTM	: 106° 09" 127' BT dan 06° 06" 88.5' LS		
Luas Lahan	: 31.570 m2	Luas Bangunan	: 595 m2
Batas Situs			
Utara	: Jl. KHO. Ternaya	Timur	: Jl. Diponegoro
Selatan	: Jl. Veteran	Barat	: Jl. M. Syamun
Pemilik	: Pemerintah daerah		
Pengelola	: Pemda Kab. Serang		
Latar Belakang	: Dibangun seiring dengan pemindahan kota dari Banten Lama ke Serang pada tahun 1800-an. Sejak awal dibangun sampai sekarang telah difungsikan sebagai kantor Bupati Serang.		
Deskripsi	: Pada bagian depan bangunan terdapat pendopo yang ditopang dengan pilar-pilar bulat.		



Nama Situs	: Karesidenan Banten		
Nomer	: 028.01.07.04.09		
Registrasi/Inv.			
Lokasi			
Alamat	: Jl. KH. Syamun		
Desa/Kelurahan	: Kota Baru	Kecamatan	: Serang
Kabupaten/Kota	: Serang	Provinsi	: Banten
Koordinat UTM	: 627282 X dan 9323842 Y		
Luas Lahan	: 5 ha	Luas Bangunan	: 196,65 m <sup>2</sup>
Batas Situs			
Utara	: Jl. TB. Bakrie	Timur	: Jl. KH. Syamun
Selatan	: Pemukiman	Barat	: Sungai Cibanten
Pemilik	: Pemerintah Provinsi		
Pengelola	: Kantor Gubernur		
Latar Sejarah	: Karesidenan Banten dibangun tahun 1814 dan digunakan sebagai kantor residen, dengan residen I J. de Bruijn W.D. (1817-1818). Pada tahun 1974 Karesidenan Banten statusnya dirubah menjadi wilayah I Propinsi Jawa Barat dan digunakan sebagai kantor Pembantu Gubernur Wilayah I Propinsi Jawa Barat sampai terbentuknya Propinsi Banten tahun 2000. Bangunan ini dahulu merupakan kantor Residentie van Bantam yang dibangun pada sekitar abad XIX. Pada tahun 1974 Karesidenan Banten dirubah statusnya menjadi Wilayah I Provinsi Jawa Barat, gedung ini digunakan sebagai Kantor Pembantu Gubernur Jawa Barat Wilayah I Banten sampai terbentuknya Provinsi Banten pada tahun 2000.		
Deskripsi	: Bangunan Utama yang merupakan tempat wakil pemerintahan Belanda di Banten atau Resident berkantor itu, mempunyai 14 ruang yang terdiri dari kantor, kamar tidur, ruang sidang, ruang tamu, ruang dapur dan pendopo. Adapun ruang Gubernur Banten,		



## Lampiran 2: Profil Narasumber Wawancara

Narasumber 1: Yadi Ahyadi, lahir 4 Juni 1977, merupakan sarjana Peradaban Islam IAIN Serang tahun 2007. Hingga sekarang telah dua belas tahun aktif berkegiatan di Laboratorium Bantenologi dan mengkaji literasi Banten, kajian naskah kuno Banten.

Narasumber 2: Bayu Arianto, merupakan sarjana Arkeologi UI angkatan 1997 dan pegawai dari kantor BP3S di Kota Serang.

